

**PEMBERANTASAN PREMANISME
DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT**

TESIS

**SUYUDI ARIO SETO
0806447444**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI, 2010**

**PEMBERANTASAN PREMANISME
DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT**

TESIS

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian

**SUYUDI ARIO SETO
0806447444**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI, 2010**

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Suyudi Ario Seto

NPM : 0806447444

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Suyudi Ario Seto
NPM : 0806447444
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
**Judul Tesis : Pemberantasan Premanisme Di Wilayah Hukum Polres
Metro Jakarta Barat**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara

(.....)

Penguji : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi

(.....)

Penguji : Drs. Ahwil Lutan, SH.MM.MBA

(.....)

Penguji : Drs. Eddy Ihwanto, M.Si

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan dan menyelesaikan tugas ini memerlukan ketekunan, keuletan dan usaha yang sungguh-sungguh dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam penulisan Tesis ini dimulai dengan penelitian yang dilakukan secara khusus untuk mengkaji tentang premanisme yang semakin merebak dan membuat kecemasan terhadap masyarakat sehingga judul penelitian ini adalah Pemberantasan Premanisme di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sejak awal menjadi mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian sampai penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Tubagus Ronny Nitibaskara dan Drs. Eddy Ihwanto, M.Si., yang dengan senang hati dan sungguh-sungguh serta penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi yang sangat tinggi, serta membekali penulis dengan tambahan ilmu dan buku-buku referensi. Suatu hal yang tidak dapat dilupakan oleh penulis adalah bahwa beliau dengan

senang hati turut mengarahkan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan juga kepada Kapolres Metro Jakarta Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah kerja Polres Metro Jakarta Barat. Demikian pula dengan segenap personil yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan senang hati menerima penulis melakukan tugas penelitian dan memberikan berbagai informasi yang diperlukan.

Kepada rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan masukannya terhadap penulisan penelitian ini. Semoga hubungan yang telah terjalin dengan baik dalam kehidupan sebagai mahasiswa yang erat selama ini akan terus melekat dihati sanubari kita semua sampai di tempat penugasan baru dan sampai akhir hayat. Menggunakan ilmu yang ditimba dari Kajian Ilmu Kepolisian untuk mewujudkan Polisi yang dicintai oleh masyarakatnya yang sedang menuju kehidupan demokratis.

Penghargaan yang sangat mendalam penulis berikan kepada orang tua penulis, H. Martoyo Suyadi Harjowijoyo, Ibunda Hj. Mardiyati Sastradijaya, Istri tercinta Hj. Dewi Yuliani, putra-putri tersayang Arkana Ahmad Yudistiro, Prawira Ahmad Harjo Wijoyo, Muhammad Hirzan Maheswara dan Hannabella Maulida Suyudi. Mereka selalu memberikan inspirasi, kekuatan dan mendo'akan setiap langkah dan kegiatan penulis.

Akhirnya, semoga apa yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan peningkatan pelayanan Polri dalam aspek penegakan hukum dalam rangka pemeliharaan kamtibmas di wilayah pada umumnya.

Penulis



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Suyudi Ario Seto**
NPM : **0806447444**
Program Studi : **Kajian Ilmu Kepolisian**
Fakultas : **Pascasarjana**
Jenis Karya : **Tesis**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEMBERANTASAN PREMANISME
DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT**

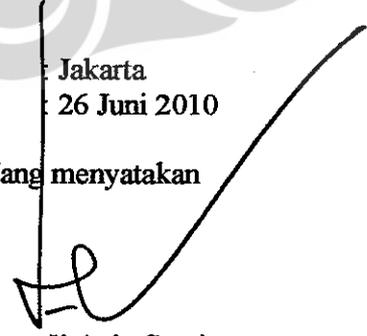
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di
Pada Tanggal

Jakarta
26 Juni 2010

Yang menyatakan


(Suyudi Ario Seto)

ABSTRAK

Nama : **Suyudi Ario Seto**
Program Studi : **Kajian Ilmu Kepolisian**
Judul : **Pemberantasan Premanisme Di Wilayah Hukum
Polres Metro Jakarta Barat**

Kata Kunci: Pemberantasan, Premanisme, dan Wilayah Hukum

Penelitian Tesis ini tentang penanganan pemberantasan aksi premanisme di wilayah Jakarta Barat yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Yang diteliti adalah tindakan Unit Khusus Anti Premanisme Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dalam memberantas kegiatan premanisme yang meresahkan masyarakat. Ruang lingkup penelitian ini adalah Polres Metro Jakarta Barat; Kondisi wilayah Jakarta Barat; Gangguan Kamtibmas yang terjadi akibat ulah para preman yang terjadi di wilayah Jakarta Barat; Populasi para preman yang ada di wilayah Jakarta Barat; dan Pembentukan unit anti premanisme Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat; serta Kegiatan pemberantasan premanisme di wilayah hukum Jakarta Barat

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dan informasi merupakan representasi dari keadaan sebenarnya atau fenomenologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interviewing*), studi literatur, dan pengamatan terlibat (*participant observer*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat pada taraf yang mencemaskan. Rasa aman masyarakat terganggu dengan adanya aktifitas premanisme yang mengganggu ketertiban umum serta keamanan di wilayah.

Konklusi dari hasil penelitian dalam Tesis ini adalah perlunya dibentuk Unit Anti Premanisme oleh Polres Metro Jakarta Barat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Jakarta Barat dalam menanggulangi merebaknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Kerjasama ini dituangkan dalam kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) antara Polri dan Pemda.

ABSTRACT

Name. : **Suyudi Ario Seto**
Study Program : **Police Science Study**
Titel : **Eradication Of Thuggery In West Jakarta Police Metro's Jurisdictions**

Keywords: Eradication, thuggery, and the Law Area

This thesis research on the treatment of thuggery in the eradication of the action undertaken by the West Jakarta West Jakarta Metro Police. Studied are the Special Unit of action Unit of the Anti thuggery Reskrim West Jakarta Metro Police in combating thuggery activities are disturbing the society. The scope of this research is the Metro Police of West Jakarta, West Jakarta condition; Disturbance caused Security of public order thugs act that occurred in West Jakarta; the civilian population in the area of West Jakarta, and anti-establishment units thuggery Jakarta Metro Police Unit Reskrim West; and thuggery eradication activities in the jurisdiction in West Jakarta

This study uses a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomenon. This approach aims to obtain data and objective information through in-depth interview technique (depth interviewing), literature studies, and observations involved (participant observer).

The results showed that the action of thuggery that occurred in the jurisdiction police station Metro West Jakarta worrisome extent. Community safety thuggery disturbed by any activity that disrupt public order and security in the region.

Conclusions from the results of research in this thesis is the need to set up unit thuggery by the Police Anti Metro West Jakarta in cooperation with local government in tackling the spread of West Jakarta thuggery actions disturbing the public. This cooperation is set forth in the collective agreement (Memorandum of Understanding) between the Police and Local Government

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------------------------------|---------|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Hipotesis | 7 |
| 3. Masalah Penelitian..... | 8 |
| 4. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 9 |
| 5. Metode Penelitian..... | 9 |
| 6. Kerangka Teori dan konsep | 11 |
| 7. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II GAMBARAN UMUM POLRES METRO JAKARTA BARAT | |
| 1. Situasi Wilayah kotamadya Jakarta Barat | 19 |
| 2. Situasi Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat | 20 |
| 3. Penanganan Aksi Premanisme | 28 |
| BAB III TEMUAN PENELITIAN | |
| A. Organisasi Preman dan Bentuk Kegiatannya..... | 36 |
| B. Bentuk Kegiatan dan Premanisme | 45 |

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Sumber Daya Kotamadya Jakarta Barat | 61 |
| 2. Kemampuan Sumber Daya Polri | 62 |
| 3. Kerjasama Polres Metro Jakarta Barat Dengan Masyarakat Dalam Penanggulangan Aksi Premanisme | 64 |
| 4. Kerjasama Polri Dengan Masyarakat Dalam Penanggulangan Aksi Premanisme | 70 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 1. Kesimpulan | 80 |
| 2. Rekomendasi | 82 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gambar : | Peta Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat dan Beberapa Sumber Informasi Penelitian | 1 |
| Gambar : | Peta Kerawanan Daerah dan Daftar Kelompok Preman Tanah/ Bangunan Sengketa | 2 |
| Gambar : | Daftar Kelompok Preman Masuk Gedung dan Daftar Kelompok Preman Rusak Pagar | 3 |
| Gambar : | Daftar Kelompok Preman Penagih Hutang dan Daftar Kelompok Preman Menduduki Tanah Sengketa | 4 |
| Gambar : | Mobil Operasional Unit Anti Premanisme Sat Reskrim Polrestro Jakarta Barat | 5 |
| Gambar : | Penangkapan Hercules dan Persidangan | 6 |
| Gambar : | Operasi Premanisme di wilayah Fatahillah Kota dan pelaku perusakan diskotik Stadium | 7 |
| Gambar : | Sebagian Pelaku Premanisme yang Ditangkap oleh Unit Anti Preman Polrestro Jakbar | 8 |

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penelitian ini tentang pemberantasan premanisme di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Yang diteliti adalah tindakan petugas Polres Metro Jakarta Barat dalam memberantas kegiatan premanisme yang meresahkan masyarakat.

Kotamadya Jakarta Barat secara administrasi pemerintahan merupakan bagian dari kota Jakarta sebagai Ibukota negara yang memiliki fungsi sebagai pusat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari pusat pemerintahan, pusat kegiatan politik, pusat kegiatan sosial budaya, pusat keagamaan, pusat kegiatan ekonomi, dan sebagai pusat pertahanan dan keamanan. Pertumbuhan dan perubahan sosial yang terjadi di wilayah Jakarta Barat begitu cepat, salah satunya adalah penambahan jumlah penduduk yang sangat drastis peningkatannya. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tersebut disebabkan bukan hanya karena tingkat angka kelahiran yang tinggi, namun juga arus urbanisasi yang begitu besar. Tingginya arus urbanisasi ini disebabkan oleh ketertarikan sebagian orang di luar kota Jakarta, salah satu wilayah yang menjadi tujuan para pendatang adalah Jakarta Barat.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Jakarta khususnya Jakarta Barat yang sangat cepat, menjadikan Jakarta Barat mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat pula dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perkembangan itu dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pada semua bidang, seperti pembangunan-pembangunan gedung perkantoran, pertokoan, jalan, hotel, pasar, real estate, dan berbagai sarana hiburan lainnya. Perkembangan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang daerah lainnya untuk datang ke Jakarta Barat untuk mengadu nasib. Pada umumnya orang-orang yang datang ke Jakarta Barat

memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk mencari masa depan dan kehidupan yang lebih baik pada saat mereka di daerah asalnya. Daya tarik yang dimiliki Kota Jakarta Barat tidak dapat dipungkiri cukup menjadi daya tarik tersendiri dan dapat membuat harapan-harapan kehidupan yang layak. Pembangunan-pembangunan secara sporadis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Barat dengan tidak memperhatikan aspek tata kota dan kondisi sosial yang ada, mengakibatkan tergesurnya masyarakat kelas bawah dari pusat-pusat kota yang menjadi fokus pembangunan.

Tersingkirnya warga kelas bawah yang ada di Jakarta Barat ke daerah-daerah yang dulu belum tersentuh pembangunan, menjadikan lokasi-lokasi baru warga kelas bawah ini menjadi lokasi yang rawan akan kriminalitas. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Barat pada saat sedang gencar-gencarnya dilakukan, memunculkan atau menghasilkan dampak-dampak sosial di masyarakat. Dampak sosial yang terjadi tentunya sangat terasa pada lapisan kelas bawah, mereka tergolong masyarakat yang tidak mampu bersaing atau kalah dengan masyarakat kelas atas dan menengah yang tentunya memiliki kekuatan dari segi finansial dan pengetahuan.

Tingginya persaingan hidup di Jakarta khususnya di Jakarta Barat memaksa seseorang harus bekerja dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bagi diri dan keluarganya. Menurut Effendi (1986: 71) bahwa "orang yang menganggur dan harus membiayai kebutuhan hidupnya, maka akan termotivasi untuk melakukan apa saja yang bisa untuk mempertahankan hidupnya". Untuk sekedar bertahan hidup, banyak diantara mereka yang tidak mampu bersaing menempuh dengan cara-cara kegiatan atau melakukan pekerjaan yang justru melanggar ketentuan dan peraturan yang ada. Pekerjaan yang mereka lakukan mengarah pada sektor-sektor informal, diantaranya menjadi PKL, pedagang asongan, juga dengan cara menjadi pengamen jalanan, pengemis, dan menjadi tenaga-tenaga pengamanan untuk kegiatan-kegiatan

yang sifatnya ilegal atau sebagai preman. Bentuk-bentuk pekerjaan demikian memang tidak memerlukan pengetahuan atau kemampuan yang khusus, yang diperlukan hanyalah keberanian dan kemauan untuk melanggar aturan yang ada.

Salah satu bentuk pekerjaan informal yang sedang marak dan gampang melakukannya adalah dengan menjadi preman atau bergabung dengan membentuk kelompok preman. Keberadaan preman saat ini sudah menjamur di setiap sudut Kota Jakarta Barat, khususnya pada lokasi-lokasi perekonomian dan pusat-pusat kegiatan masyarakat serta saat ini berkembang pada lingkungan perusahaan-perusahaan. Penggunaan terhadap keberadaan preman pada perusahaan-perusahaan resmi, lokasi-lokasi perekonomian, dan lokasi-lokasi keramaian lainnya, pada dasarnya pemanfaatan tersebut hanya lebih bersifat insidental. Biasanya perusahaan dan lokasi-lokasi perekonomian tersebut terpaksa menggunakan tenaga preman karena didahului dengan adanya ancaman-ancaman atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan preman terhadap perusahaan atau lokasi-lokasi perekonomian.

Bentuk-bentuk kegiatan para preman yang sudah menjadi budaya adalah memungut uang keamanan, mulai dari yang bersifat sukarela sampai dengan pemaksaan. Terkadang tidak segan-segan para preman untuk memaksa sumber pendapatannya melakukan tindakan dengan merusak, melukai, menyakiti, dan bahkan sampai pada pembunuhan. Kunarto (1999: 196) mengatakan bahwa "sikap, tindakan, dan perilaku preman dengan melakukan tindakan pemaksaan, merusak, melukai, dan membunuh tersebut dikenal sebagai praktik premanisme". Praktik premanisme di kota-kota besar, seperti Jakarta, pada umumnya tumbuh dan berkembang di lokasi-lokasi seperti, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, perusahaan, terminal, pasar-pasar, daerah pertokoan, dan lain-lain. Preman untuk lebih mempertahankan keberadaannya salah satunya dengan membentuk kelompok-kelompok tersendiri atas dasar suku bangsa atau daerah asal yang

sama, dengan adanya kelompok preman ini keberadaan mereka dapat diakui dan diperhitungkan oleh masyarakat atau preman lainnya.

Secara historis kita tidak bisa lari dan mangkir dari kenyataan, bahwa keberadaan preman sudah menjadi bagian dari struktur sosial bangsa ini. Bahkan bukan saja sejarah sebuah bangsa, tetapi menjadi sejarah kemanusiaan pada umumnya, karena jika dianalisa sudah ada bersamaan dengan saat pertama kali manusia melakukan interaksi antar sesama, maka preman ataupun sebutan lainnya dalam lapisan sejarah tertentu, menjadi sebuah relasi kemanusiaan (*human relation*) yang tidak dipermasalahkan (minimal keberadaannya). Walaupun pada praktiknya atau kegiatan-kegiatannya, masyarakat sering terganggu dengan kehadiran dari entitas sosial yang satu ini.

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan para preman tentunya tidak dapat dikatakan sedikit, bahkan dampak yang ditimbulkan dapat memicu dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di masyarakat. Keberadaan dan kegiatan-kegiatan para preman sebenarnya sudah mendapat perhatian oleh aparat kepolisian dan instansi pemerintah, dengan melakukan berbagai upaya penanganan.

Bagi para preman, kejahatan atau penyimpangan yang mereka lakukan pada dasarnya merupakan suatu bentuk adaptasi terhadap terbatasnya kesempatan mereka untuk mencapai sukses pada bidang materi melalui cara-cara yang dianggap sah secara moral. Bentuk dari adaptasi dengan terbatasnya kesempatan mereka mempelajari melalui proses belajar sosial dalam kelompok atau lingkungannya, sebagaimana perilaku *non* kriminal lainnya yang kemudian dijadikan suatu budaya bagi mereka. Selain itu secara tidak langsung adanya dukungan dari pemerintah, khususnya aparat kepolisian dengan tidak melakukan strategi penanganan yang baik dan pembiaran-pembiaran atau seolah-olah tidak tahu mengenai hal itu. Pembiaran ini dapat disebabkan atas dasar ketidakmampuan polisi menangani atau mendapatkan keuntungan dari keberadaan preman di sekitarnya.

Di Jakarta Barat cukup banyak lokasi-lokasi yang sudah menjadi ladang subur para preman untuk melakukan kegiatannya. Mengingat wilayah Jakarta Barat merupakan salah satu dari pusat kegiatan perdagangan, perekonomian dan dunia hiburan terbesar di wilayah Jakarta. Sepanjang hari baik siang maupun malam, di wilayah Jakarta Barat selalu disibukkan oleh adanya aktifitas perdagangan, kegiatan perekonomian dan dunia hiburan.

Maraknya kegiatan perekonomian, perdagangan dan hiburan tersebut tentunya merupakan tempat atau lahan yang subur bagi preman untuk melakukan aksinya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Salah satu aksi yang mereka lakukan adalah dengan cara menodong para penumpang bis umum dan kendaraan pribadi, penjambretan, pencopetan dan sebagainya. Keberadaan para preman di wilayah ini bagaikan genangan air yang ada pada mata airnya. Artinya, kalau ada kekosongan terhadap suatu tempat apakah karena preman tersebut ditangkap atau ditertibkan, pergi, mati, atau insaf, maka kekosongan itu akan secara otomatis terisi oleh preman yang baru. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh (Kunarto, 1999: 197):

Maraknya aksi premanisme, tentunya membuat masyarakat sekitarnya mempunyai rasa cemas dan tidak merasa aman terlebih bila bepergian baik menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Untuk itu merupakan tugas aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mengacu dari tugas pokok Polri tersebut, maka sudah selayaknya harapan masyarakat untuk tidak menjadi korban dari pelaku kejahatan, melakukan aktifitas sehari-hari dengan tenang, dan dapat mewujudkan situasi dan kondisi yang aman serta tertib pada lingkungan tempat tinggal maupun di tempat mencari nafkah.

Harapan-harapan masyarakat terhadap Polri tentunya menjadi tujuan utama atas keberadaan Polri di tengah-tengah masyarakat, sebab dengan terpenuhinya harapan yang ada tersebut tersebut, maka akan mempengaruhi terselenggaranya program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Rumusan tugas pokok Polri yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tersebut bukan merupakan suatu bentuk urutan prioritas, artinya dari ketiga tugas pokok itu memiliki kedudukan dan prioritas yang sama penting serta tingkatannya. Sehingga pada pelaksanaannya berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat serta lingkungan yang dihadapi atau objek pelaksanaan tugas pokok tersebut. Tidak adanya skala prioritas pada tugas pokok Polri ini, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok itu harus dapat dilaksanakan secara simultan dan dikombinasikan satu dengan yang lainnya. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut harus berdasarkan norma-norma hukum yang ada, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (Sitompul, 2005).

Akan tetapi, pada kenyataannya saat ini di wilayah Jakarta Barat masih banyak masyarakat yang menjadi korban dari para pelaku kejahatan, yang salah satu contohnya terhadap bentuk-bentuk kegiatan preman dalam kendaraan umum, lampu lalu lintas dan sebagainya. Perilaku-perilaku preman dan kelompoknya ini semakin hari semakin meluas dan menyatu dalam kehidupan pada lingkungan tersebut, maka tidak dapat disalahkan adanya anggapan sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa aparat kepolisian tidak mampu dalam memberikan perlindungan maupun rasa aman terhadap masyarakat.

Peran dan fungsi Polri khususnya aparat kepolisian tingkat Polres, tentunya bertanggung jawab atas Kamtibmas pada wilayah hukumnya. Kepekaan aparat kepolisian terhadap semua gejala-gejala sosial yang terjadi dan bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas lainnya, tentunya akan menjadi salah satu sarana berlindung bagi masyarakat terhadap segala bentuk ancaman, gangguan, dan ketidakadilan yang membayangi atau dirasakannya. Penanganan terhadap

aksi premanisme secara terencana dan terprogram merupakan langkah yang harus segera dilakukan oleh Polri dalam hal ini Polres Metro Jakarta Barat.

Penanganan dan pemberantasan aksi premanisme yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat mengacu kepada fungsi dan peran kepolisian. Dalam penelitian ini ditunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam penanganan dan pemberantasan preman di wilayah hukumnya. Mendasari tugas pokok tersebut kepolisian melakukan program-program penanganan terhadap aksi premanisme. Salah satu upayanya adalah dengan adanya kebijakan Kapolri yang tertuang dalam bentuk Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Rencana Kerja Kapolri T.A. 2007. Selain itu juga lebih spesifik tertuang dalam Rencana Operasi Pekat 2007 Mabes Polri No. Pol.: R/Renops/1991/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan Kendali Pusat Penanggulangan terhadap kejahatan premanisme, perjudian, pornografi, Minuman Keras dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu Polres Metro Jakarta Barat dalam rangka memberantas aksi premanisme telah membentuk suatu unit khusus yaitu Unit Anti Premanisme yang berada di bawah Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini untuk memberantas aksi premanisme di wilayah hukum Polres Jakarta Barat timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana tindakan pemberantasan aksi premanisme yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat untuk menciptakan Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Jakarta Barat ?”

2. Hipotesis

Memperhatikan latar belakang masalah maka hipotesis yang digunakan sebagai landasan kerja penelitian dan masalah penelitian adalah : “Penanganan pemberantasan preman dikelola dengan membentuk Unit Khusus Premanisme dengan melibatkan Unit lain diluar Satuan Reskrim untuk menciptakan

kamtibmas yang kondusif“. Hal ini terkait dengan kegiatan premanisme di wilayah hukum Jakarta Barat sampai saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukannya pun semakin bervariasi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Apabila kegiatan seperti ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan baru dalam bidang Kamtibmas yang tentunya akan dapat menghambat proses pembangunan berkesinambungan. Beberapa aksi yang dilakukan oleh para preman di kawasan ini diantaranya adalah memeras, menakut-nakuti, menodong atau merampas hak-hak orang lain tanpa mengenal waktu dan tempat, bahkan kelompok preman dalam jumlah yang besar sering dimanfaatkan oleh orang atau pihak tertentu untuk menagih utang yang lazim disebut *debt collector*. Selain itu ada juga kegiatan preman yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menguasai lahan atau tanah sengketa dan juga dimanfaatkan sebagai jasa keamanan ilegal khususnya ditempat-tempat hiburan malam dan pusat-pusat keramaian.

3. Masalah Penelitian

Masalah penelitian dalam penelitian ini adalah: “Penanganan pemberantasan aksi premanisme di wilayah Jakarta Barat yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam memberantas premanisme ”

Sedangkan yang menjadi fokus penelitiannya adalah tindakan anggota Unit Khusus Anti Premanisme Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Ruang lingkup masalah penelitian ini mencakup sebagai berikut :

- Pengorganisasian Polres Metro Jakarta Barat;
- Kondisi wilayah Jakarta Barat pada umumnya;
- Gangguan Kamtibmas yang terjadi akibat ulah para preman yang terjadi di wilayah Jakarta Barat;
- Populasi para preman yang ada di wilayah Jakarta Barat;
- Pembentukan unit anti premanisme Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat;

-- Kegiatan pemberantasan premanisme di wilayah hukum Jakarta Barat.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta memberikan gambaran mengenai bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam memberantas aksi premanisme di wilayah hukumnya. Dengan demikian akan diperoleh suatu gambaran mengenai pertimbangan dan kebijakan apa saja yang akan diberikan dalam rangka menciptakan suasana Kamtibmas yang kondusif, aman dan nyaman dalam masyarakat.

Dengan demikian diharapkan tujuan penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif terhadap pengembangan ilmu kepolisian di masa yang akan datang, khususnya dalam upaya menangani preman oleh berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- (1) Kegunaan teoritis sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu manajemen pada umumnya dan ilmu manajemen kepolisian khususnya yang berkaitan dengan penanganan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
- (2) Kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini dapat menjadi suatu konstribusi cara bertindak di lapangan yang bermanfaat untuk berbagai pihak, baik pada tingkat Polres maupun bagi kesatuan lain dalam melakukan penanganan preman di wilayahnya.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode *etnografi* (Suparlan, 1994) yaitu dengan cara hidup diantara mereka yang diteliti dalam jangka waktu yang relatif cukup untuk memahami dan mengungkapkan

makna dari tindakan-tindakan para preman yang melakukan kegiatannya di wilayah Jakarta Barat.

Untuk dapat memperoleh suatu pemahaman yang mendalam terhadap obyek penelitian yang diamati, maka dilakukan langkah-langkah pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. Pengamatan

Metode pengamatan, adalah suatu metode dimana penulis mengamati lokasi-lokasi dan tempat-tempat para preman melakukan aksi kejahatannya di wilayah Jakarta Barat.

b. Pengamatan Terlibat

Dengan pengamatan terlibat penulis akan melibatkan diri dalam lingkungan perkumpulan para preman yang melakukan aksi kejahatannya di wilayah Jakarta Barat, selain itu akan ikut serta dalam melaksanakan kegiatan razia yang dilaksanakan secara rutin oleh unit anti preman Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

c. Wawancara dengan Pedoman

Wawancara dengan pedoman akan penulis lakukan dengan sejumlah para preman di wilayah Jakarta Barat, baik yang masih aktif melakukan aksi kejahatannya maupun yang sudah insaf, juga akan dilakukan wawancara terhadap warga masyarakat yang telah menjadi korban dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh para preman. Selain itu wawancara juga akan dilakukan terhadap para personil unit anti premanisme di lingkungan Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

d. Kajian dokumen

Sedangkan kajian dokumen akan penulis lakukan dengan mencari dan menyeleksi aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan premanisme di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Jakarta Barat pada khususnya.

6. Kerangka Teori dan Konsep

Penelitian ini mengenai pemberantasan premanisme di wilayah Jakarta Barat, terutama jika dilihat dari berbagai bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya aksi premanisme. Kerangka teori yang mendasari penulisan ini sebagai berikut ;

Bahwa tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat dihukum, dengan padanan kata tindak pidana antara lain; peristiwa pidana; pelanggaran hukum; dan perbuatan pidana. Menurut Schravendijk, bahwa tindak pidana memuat unsur-unsur; seperti kelakuan (orang yang melakukan); bertentangan dengan kesadaran hukum; diancam dengan hukuman; dan, dipersalahkan atau kesalahan (Kanter 2002 : 11).

Dilakukannya suatu kejahatan oleh masyarakat dalam bentuk aksi-aksi premanisme yang dilakukan kelompok-kelompok preman di wilayah Jakarta Barat akan dianalisis dari beberapa konsep atau teori. Diantaranya teori *conduct-norm* dari Thorsten Sellin dan Konsep *Lower Class Culture* dari Walter Miller.

a. *Teori conduct-norm dari Thorsten Sellin.*

Mempelajari beberapa kelompok sosial yang hidup dimasyarakat dan memiliki kompleksitas norma yang berbeda dalam kehidupannya dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dari kelompok tersebut, dan memunculkan keinginan untuk saling memperluas kepentingan, pemisahan dan benturan atau konflik antar kelompok, adanya keinginan dari kelompok tersebut menurut teori ini ada tiga proposisi ;

- 1). *When these codes clash on the border of contiguous culture areas* (ketika terjadi benturan peraturan di suatu daerah berhubungan dengan adat/budaya.

- 2). *When, as may be the case with legal norma, the law of one cultural group is extended to cover the territory of another* (ketika kasus itu terjadi peraturan legal dalam salah satu kelompok budaya ingin memperluas kekuasaan).
- 3). *When members of one culture group migrate to another.* (salah satu dari kelompok pindah ke kelompok lain).

b. Konsep Lower Class Culture dari Walter Miller.

Teori Kejahatan Budaya Kelas Bawah (*lower Class Culture Theory*) dapat dianalisis terhadap 6 premis alternative yang dikemukakan oleh Walter Miller setelah melakukan riset di daerah kumuh di Amerika. Premis tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1). *Trouble* atau mencari gara-gara ditujukan dengan melakukan suatu perbuatan pidana seperti mabuk-mabukan, pemalakan dan pencurian
- 2). *Toughness* atau ketangguhan atau keberanian dilakukan dengan tindakan yang tidak pernah merasa kapok atau jera, walaupun telah berulang kali ditangkap oleh Polisi.
- 3). *Smartness* dilakukan melalui kamufase kelompok organisasi masa (Ormas) atau organisasi politik tingkat Kelurahan.
- 4). *Excitement* terwujud melalui kegiatan kelompok yang sering mabuk-mabukan, bermain kartu, atau bernyanyi-nyanyi ditempat berkumpul mereka. Dengan menjadikan perbuatan pidana sebagai mata pencaharian.
- 5). *Fate* atau nasib dilakukannya suatu perbuatan jahat atau tingkat laku jahat oleh para pelaku aksi premanisme, karena mereka merasa bahwa kehidupannya dikuasai oleh suatu kekuatan yang besar, yang ada diluar jangkauan mereka. Mereka percaya kehidupan ini

telah diatur oleh nasib, dan tinggal menjalani hidupnya diatas rel nasib yang diperuntukan baginya.

Artinya mereka yang telah ditakdirkan untuk memiliki nasib sebagai penjahat, tentunya hidupnya adalah menjadi penjahat, dengan demikian konsep ini menyiratkan kepercayaan bahwa kehidupan seseorang memang ditakdirkan untuk bergelut dengan dunia kejahatan.

- 6). *Autonomy* melakukan suatu perbuatan dengan cara menolak kontrol atau pembatasan dari pihak luar, dan mereka melakukan kegiatan dalam ikatan kelompok secara mandiri.

Premis tersebut di atas ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Walter Miller di Amerika Serikat tentang timbulnya kejahatan oleh kelompok preman.

c. Manajemen

Menurut James A.F. Stoner, Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Mary Parker Follet, Manajemen adalah suatu seni, karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus.

Lain halnya T. Hani Handoko yang menyimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

d. Premanisme

Premanisme adalah suatu tindakan kejahatan yang meresahkan keamanan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum dan memberikan pengaruh yang negatif bagi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Premanisme memiliki 3 (tiga) macam tingkatan, yaitu:

- 1) Tingkat profesional, premanisme yang dilakukan dengan cara terorganisir dan berlindung di bawah organisasi masyarakat atau partai politik yang difasilitasi dengan dana yang memadai. Premanisme jenis ini biasanya sulit diberantas karena mendapatkan perlindungan dari kelompok yang mempunyai hubungan politik dengan sebagian oknum pejabat pemerintah. Mereka para preman jenis ini berseragam dan tidak nampak seperti preman jalanan. Mereka disewa dan dibayar oleh sebuah perusahaan atau instansi tertentu untuk merampas tanah-tanah milik masyarakat atau membalak setiap pertokoan dengan cara membelinya dengan harga murah dan penuh tipu muslihat. Preman berkrah putih telah banyak menyengsarakan masyarakat muslim dengan mengambil hak-hak mereka dengan politik tipudaya.
- 2) Premanisme tingkat amatir, premanisme yang terdiri dari beberapa orang tau tergabung dalam sebuah kelompok yang memeras atau meinta setoran kepada para pedagang, para sopir, para penjual dan para pembeli di tempat- tempat umum seperti : pasar, terminal, stasiun atau tempat umum yang lain.
- 3) Premanisme tingkat bulu atau kelas teri ialah premanisme yang dilakukan seseorang yang kehilangan pekerjaannya akibat PHK atau tidak menemukan pekerjaan alias pengangguran. Mereka pun berprofesi sebagai preman dadakan atau spontanitas untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Mereka menjadi preman karena kondisi yang terpaksa.

Sebenarnya asal-mula preman berasal dari bahasa Belanda, *Fremach* yang artinya: seseorang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial belanda dengan cara merampok harta mereka untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin seperti layaknya Robinhood yang membela hak-hak masyarakatnya yang tertindas oleh pejabat yang berkuasa pada waktu itu. Akan tetapi mengalami perubahan kepada arti dan tujuan yang negatif, yaitu: orang yang melakukan perampasan atau perampokan harta orang lain.

e. **Organisasi**

Organisasi merupakan sebuah wadah yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu dan bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sekelompok orang tersebut merupakan suatu kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat didefinisikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1994: 4). Andrew dalam Kunarto mengemukakan, organisasi adalah: "Model analisis umum, sebagai suatu sistem adaptif (terarah pada tujuan) dengan sejumlah variabel yang saling bergantung dan menyesuaikan diri satu dengan yang lain terhadap stimulasi parameter sistem yang berkemampuan untuk mencapai tujuan diberbagai kondisi yang berbeda-beda". (Kunarto: 1997: 2). Dan disimpulkan oleh Kunarto pengertian organisasi adalah suatu sistem sosial yang memiliki aktifitas terintegrasi dengan tujuan terkalkulasi.

Chester I. Benhard dalam Malayu SP. Hasibuan mendefinisikan organisasi adalah: "Suatu sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. (*As a system of consciously coordinated activity or forces of two or more person*)". (Hasibuan, 1999: 25).

f. Fungsi dan Peran Polri

Konsep fungsi selalu digunakan dalam kaitannya dengan konsep sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem yang berada dalam hubungan fungsional, atau saling mendukung dan menghidupi, yang secara bersama-sama memproses masukan untuk dijadikan keluaran. Sedangkan konsep peranan selalu dilihat dalam kaitannya dengan posisi-posisi yang dimiliki individu-individu dalam sebuah struktur yang satu sama lainnya berada dalam satu kaitan hubungan peranan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam struktur tersebut (Suparlan, 1999).

Fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Menurut Suparlan (1999) fungsi polisi adalah sebagai berikut:

Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antar individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat; 2) Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat, masyarakat dan negara; 3) Mengayomi warga masyarakat, masyarakat dan negara dari ancaman dan tindakan yang mengganggu dan merugikan; Ketiga Fungsi polisi tersebut harus dilihat dalam perspektif individu, masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem yang memproses masukan program-program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Dalam proses-proses yang sedang berlangsung tersebut fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan menjaga agar individu, masyarakat dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dan sakral dalam proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan.

Dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 14 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, bahwa untuk melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas: (1) melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (2) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan (3) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Tentang peran Polri disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dan menurut Suparlan (1999) peranan Polri tersebut harus dilihat sebagai peranan dari petugas Polri dalam masyarakat Indonesia. Peranaan-peranaan tersebut harus dilihat bahwa Polri adalah sebagai pranata yang ada dalam masyarakat yang unsur-unsur perannya masing-masing berada dalam hubungan fungsional untuk memproses masukan menjadi keluaran bagi masyarakat.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, kajian kepustakaan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum wilayah penelitian yang berisikan situasi dan kondisi Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat, bentuk kegiatan masyarakat dan gangguan kamtibmas 2007-2010.

Bab III Temuan Penelitian tentang keberadaan organisasi preman dan bentuk kegiatannya di Jakarta Barat berisi tentang kehidupan kelompok atau individu preman yang meresahkan masyarakat yang menyangkut struktur organisasi, penyebab timbulnya preman, modus operandi, waktu kegiatan, daerah kekuasaan, alat yang digunakan dan aturan-aturan yang berlaku serta bentuk-bentuk kegiatannya.

Bab IV Analisa dan Pembahasan tentang penanganan preman yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat, pembentukan Unit Anti Premanisme, kegiatan operasi kepolisian, Pola-pola hubungan dalam penanganan preman oleh Kepolisian, Pemda, Instansi terkait dan masyarakat.

Bab V Kesimpulan dan saran berisi tentang konklusi dari hasil penelitian, pembahasan dan pemaknaan peneliti. Disamping itu, disarankan atau rekomendasi oleh peneliti sebagai pengembangan dan perbaikan terhadap penelitian yang sedang dilangsungkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM POLRES METRO JAKARTA BARAT

1. Situasi Wilayah Kotamadya Jakarta Barat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1978 tentang Pembentukan wilayah Kota dan Kecamatan dalam wilayah DKI Jakarta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1990, wilayah Kotamadya Jakarta Barat mempunyai luas wilayah kurang lebih 12.781.97 Ha, yang secara administratif terbagi dalam 8 wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk 1.608.276 jiwa. Menurut registrasi kependudukan Tahun 2010 berjumlah 1.847.205 dengan kepadatan 15.127 jiwa / Ha dengan laju pertumbuhan penduduk 0,4 % dalam 3 tahun terakhir. Kotamadya Jakarta Barat sebagai bagian dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan Pusat Kegiatan Ekonomi , Politik, Sosial Budaya dan Hankam sekaligus merupakan bagian dari Jalur Sumatera menuju Jalur Pantura dan Bali, serta berfungsi sebagai pintu gerbang Internasional dengan berbagai kerawanan, baik yang berskala Nasional maupun Internasional.

Selain dari pada itu Kotamadya Jakarta Barat adalah pusat kegiatan pariwisata dan hiburan malam yang sebagian besar dikelola oleh pengusaha golongan non pribumi (Cina) dan merupakan titik kumpul pendatang dari berbagai suku, ras dan agama yang dapat menimbulkan kerawanan terjadinya konflik SARA.

Untuk mewujudkan keamanan di wilayah Jakarta Barat dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan masyarakat, perlindungan dan penegakan hukum sejalan dengan visi dari Polres Metro Jakarta Barat situasi tersebut jauh dari harapan masyarakat hal dapat dilihat dari keterbatasan sumber daya dan anggaran, maka Pembangunan Kekuatan, Pembinaan Kekuatan dan Operasional Kepolisian tidak dilaksanakan secara terpadu dan tidak nampak adanya kerjasama lintas sektoral termasuk pelibatan masyarakat serta tanpa

memperhitungkan skala prioritas pelaksanaan tugasnya untuk mengurangi keresahan yang benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya maraknya aksi premanisme.

2. Situasi Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat

Polri saat ini menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat baik dari eksternal maupun dari internal Polri sendiri. Perkembangan perekonomian sangat menentukan terjadinya perubahan masyarakat dan perubahan iklim politik memberikan suatu dampak yang cukup signifikan dalam mewujudkan upaya Polri untuk mewujudkan pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Perubahan masyarakat Indonesia saat ini sangat besar dipengaruhi oleh teknologi dan informasi serta globalisasi yang membuat dunia bergerak semakin cepat dan sempit dan tentu memberikan suatu dampak baik secara positif dan negatif.

Perubahan negatif yang timbul adalah banyaknya bentuk kejahatan-kejahatan baru yang menggunakan modus operandi yang berkembang dan dibantu dengan teknologi dan informasi, kejahatan yang banyak di monopoli daerah kota-kota besar seperti di Ibukota DKI Jakarta khususnya di daerah Kotamadya Jakarta Barat yang merupakan salah satu pusat perdagangan Industri elektronik dan hiburan terbesar di Indonesia yang tentunya menjadi lahan yang empuk dan subur bagi para preman untuk melakukan aksinya dan upaya penanganan terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat hanya bersifat sektoral saja dan belum betul-betul sepenuhnya menghilangkan keresahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini terjadi disebabkan karena tidak terciptanya sinergitas penanganan aksi premanisme yang dilaksanakan Polres Metro Jakarta Barat khususnya yang dilaksanakan oleh Satuan Fungsi Reskrim tanpa melibatkan satuan fungsi operasional Kepolisian lainnya seperti Satuan Intelkam, Samapta, Lalu lintas

dan Bagian Binamitra termasuk tidak adanya koordinasi dengan Masyarakat dan lintas sektoral (Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum Lainnya).

Polres Metro Jakarta Barat merupakan salah satu Instansi Kepolisian yang berada dibawah naungan Polda Metro Jakarta Raya. Secara struktural, Polres Metro Jakarta Barat membawahi 8 (delapan) buah Polisi Sektor (Polsek), yaitu: (1) Polsek Metro Cengkareng; (2) Polsek Metro Kalideres; (3) Polsek Metro Palmerah; (4) Polsek Metro Tanjung Duren; (5) Polsek Metro Tambora; (6) Polsek Metro Tamansari; (7) Polsek Metro Kebon Jeruk; dan (8) Polsek Metro Kembangan yang wilayah hukumnya berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Polsek Penjaringan, Polres Metro Jakarta Utara;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Polres Metro Tangerang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Polsek Batu Ceper, Polres Metro Tangerang; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Polsek Metro Gambir dan Polsek Metro Sawah Besar, Polres Metro Jakarta Pusat.

Polres Metro Jakarta Barat dipimpin langsung oleh seorang Kapolres dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang berada di wilayahnya, dalam pelaksanaan tugasnya dibawah pengendalian dari Kapolda Metro Jaya, namun pada kenyataannya kondisi personil Polri masih belum memenuhi standar internasional yaitu 1 : 1013. sebagai Police Ratio dengan penduduk yang dilayani.

Kekuatan Personil Polres Metro Jakarta Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Personil Polri

a. Polri.

| NO | PANGKAT | DSP | RJIL | KET |
|----|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | KOMBES | 1 | 1 | |
| 2 | AKBP | 4 | 4 | |
| 3 | KOMPOL | 12 | 13 | Kelebihan 1 Pamen NonJob sebagai Ka Primkoppol |
| 4 | AKP | 44 | 86 | 1. Kelebihan AKP 42 pers 2. AKP diberdayakan sebagai Ka Pospol 39 Pers. 3. AKP Job Kumpul telat 22 pers. 4. AKP Non Job 8 pers/ |
| 5 | IPDA IPTU | 184 | 51 | 1. Kekurangan IIPDA/IPTU 133 pers. 2. AIPDA/AIPTU duduki jabatan Ipd/Iptu 66 pers. |
| 6 | BA | 2.382 | 1.666 | Kekurangan BA 716 pers. |
| 7 | TA | - | 3 | Kelebihan TA 3 pers |
| | JUMLAH | 2628 | 1824 | |

Sumber : Polres Metro Jakarta Barat. 2010

Tabel 1 menggambarkan nominasi personil Polri Polrestro Jakbar, terlihat bahwa masih terjadi kelebihan dan kekurangan personil pada setiap jenjang kepangkatan yang ada. Pada Pamen kelebihan satu personil, pada Pama (AKP kelebihan 42 personil, pada pangkat IPDA/IPTU kekurangan 133 personil). Pada jenjang bintanga kekurangan 716 personil dan Tamtama kelebihan 3 personil.

Tabel 2
Personil PNS-Polri

b. PNS

| NO | PANGKAT | DSP | RJIL | KET |
|----|---------|-----|------|------------------------------------------------------|
| 1 | GOL III | 6 | 31 | Gol III Kelebihan 25 pers GoL III 28 pers Non Job |

| | | | | |
|---|---------------|------------|-----------|----------------------------|
| 2 | GOL II | 122 | 18 | GoL II kekurangan 104 pers |
| 3 | GOL I | - | 2 | Gol I Kelebihan 2 pers |
| | JUMLAH | 128 | 51 | |

Sumber : Polres Metro Jakarta Barat. 2010

PNS-Polri diuraikan pada tabel 2 dimana terdapat kelebihan personil sebanyak 25 orang pada Gol III, dan kekurangan 104 orang pada jenjang Gol. II, serta kelebihan 1 orang pada Gol. I.

Tabel 3
Pendidikan Kepolisian

c. Pendidikan

| No | JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH | KET |
|----|------------------|--------------|-----|
| 1 | SESPATI | - | |
| 2 | SESPIM | 3 | |
| 3 | PTIK | 8 | |
| 4 | SELAPA | 3 | |
| 5 | AKPOL | 2 | |
| 6 | SEPA | 7 | |
| 7 | SECAPA | 117 | |
| 8 | SEBA | 1.666 | |
| 9 | SECATA | 3 | |
| 10 | AGOL PA | 15 | |
| | JUMLAH | 1.824 | |

Sumber : Polres Metro Jakarta Barat. 2010

Tabel 3 menguraikan tentang Personil Polri yang telah menempuh pendidikan teknis kepolisian yang keseluruhannya berjumlah 1.824 personil dimana terperinci menjadi jenjang pendidikan perwira (Secapa, Sepa, Akpol, PTIK, dan Selapa, serta Sespim), Secaba untuk jenjang Bintara dan Secata untuk Tamtama.

d. Reward and Punishment

Tabel 4
Pemberian Penghargaan (*reward*)

| NO | SATKER | JUMLAH | | PENGHARGAAN | KET |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| | | POLRI | PNS | | |
| 1 | NARKOBA | 15 | | PIAGAM | |
| 2 | CENKARENG | 4 | | PIAGAM | |
| 3 | TAMBORA | 2 | | PIAGAM | |
| 4 | JERUK | 4 | 1 | PIAGAM | |
| 5 | LANTAS | 1 | | PIAGAM | |
| JUMLAH | | 26 | 1 | | 27 |

Sumber : Polres Metro Jakarta Barat. 2010

Pelaksanaan *reward* dijelaskan pada tabel 4 dimana penghargaan yang diberikan kepada anggota sebanyak 27 piagam dengan berbagai keberhasilan individu yang telah dicapai guna mendukung operasional organisasi Polrestro Jakbar.

Tabel 5
Hukuman (*punishment*)

| NO | PELANGGARAN | JML | SELESAI | PROSES | KET |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|
| 1 | DISIPLIN | 62 | 38 | 24 | |
| 2 | PIDANA | 8 | 1 | 7 | |
| 3 | KODE ETIK | 8 | 1 | 7 | |
| 4 | PTDH | 2 | 2 | - | Skep Kapolda MJ /238/VI/2009, Tgl 3 Juni 2009, TMT 20 |
| JUML | 80 | 42 | 38 | | |

Sumber : Polres Metro Jakarta Barat. 2010

Tabel 5 menggambarkan tentang hukuman terhadap anggota yang dirinci dalam 4 jenis pelanggaran yaitu disiplin 62 personil, pidana 8 personil, Kode Etik 8 personil, dan PTDH 2 personil. Jumlah keseluruhan 80 personil.

Maraknya aksi premanisme di wilayah hukum Polres Jakarta Barat, menuntut adanya kesiapan dan peningkatan Sumber Daya Manusia serta peralatan dan perlengkapan yang memadai guna mengatasi dan mengantisipasi setiap permasalahan yang terjadi sesuai tugas pokoknya sebagai penanggung jawab kamtibmas dan penanggulangan tindak pidana yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam penanganan aksi premanisme yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat menggelar kekuatan sumber daya yang ada namun dalam pelaksanaannya kurang menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat karena tidak dilaksanakannya langkah-langkah penanggulangan yang tepat sasaran.

Adapun penggelaran kekuatan sumber daya Satuan Reskrim yang ada sebagai berikut :

Tabel 6
Daftar Kekuatan Personil Serse Polres Metro Jakarta Barat

| NO | WILAYAH | PENYELIA | WORKER | PNS | JML |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| 1. | Satreskrim | 17 | 153 | 2 | 45 |
| 2. | Cengkareng | 1 | 26 | 1 | 32 |
| 3. | Kalideres | 1 | 28 | 1 | 9 |
| 4. | Tj. Duren | 1 | 29 | 1 | 30 |
| 5. | Palmerah | 1 | 20 | 1 | 4 |
| 6. | Tambora | 2 | 24 | 1 | 2 |
| 7. | Kebun Jeruk | 1 | 25 | -- | 8 |
| 8. | Kembangan | 1 | 27 | -- | 62 |
| 9. | Taman Sari | 1 | 36 | -- | 189 |
| J U M L A H | | 27 | 368 | 7 | 395 |

Sumber: Intel Dasar Polres Metro Jakbar, 2009

Tabel 6 menggambarkan nominasi personil pada Sat Reskrim Polrestro Jakbar dimana jumlah keseluruhan (termasuk PNS Polri) sebanyak 395 personil.

Sedangkan dislokasi personil ini disamping pada Sat Reskrim Polrestro Jakbar, juga terdistribusi pada Polsek jajaran.

Dalam rangka mendukung tugas-tugas kepolisiannya, Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti kendaraan bermotor, senjata api dan peralatan komunikasi. Berbagai peralatan tersebut seperti terlihat dalam tabel-tabel berikut ini

Tabel 7
Inventaris Kendaraan Bermotor Polres Metro Jakarta Barat

| NO | JENIS KENDARAAN | KONDISI | | | JUMLAH |
|--------------------|-----------------|----------|--------------|-------------|----------|
| | | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | |
| 1. | Roda Dua | 4 | -- | -- | 4 |
| 2. | Roda Empat | -- | 2 | -- | 2 |
| J U M L A H | | 4 | 2 | -- | 6 |

Sumber: Intel Dasar Polres Metro Jakbar, 2009

Tabel 7 menggambarkan dukungan operasional kepolisian Restro Jakbar dalam memobilisasi sumberdaya yaitu kendaraan bermotor. Dari jumlah keseluruhan 6 unit, rusak ringan 2 unit.

Tabel 8
Inventaris Senjata Api Polres Metro Jakarta Barat

| NO. | JENIS SENJATA | KONDISI | | | JML. |
|--------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | |
| 1. | Revolver 38 SPC | 329 | -- | -- | 329 |
| 2. | Peluru Cal 38 | 5922 | -- | -- | 5922 |
| 3. | Senjata Api Bahu | 4 | -- | -- | 4 |
| 4. | Peluru Cal 7,62 | -- | -- | -- | -- |
| J U M L A H | | 6255 | -- | -- | 6255 |

Sumber : Intel Dasar Polres Metro Jakbar, 2009

Tabel 8 menunjukkan kondisi inventaris senjata api beserta amunisi yang dimiliki oleh Polrestro Jakbar. Jenis paling banyak adalah Revolver 38 SPC

sebanyak 329 unit dalam kondisi baik semua dan Senjata Api Bahu sebanyak 4 unit kondisi baik.

Tabel 9
Inventaris Alat-alat Komunikasi Polres Metro Jakarta Barat

| NO | JENIS BARANG | KONDISI | | | JUMLAH |
|--------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| | | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | |
| 1. | H.T. | 6 | -- | -- | 6 |
| 2. | Telephone | 3 | -- | -- | 3 |
| 3. | Faximile | 1 | -- | -- | 1 |
| 4. | Monitor Handphone | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Monitor Speaker | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Monitor TV | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Microphone | -- | -- | -- | -- |
| J U M L A H | | 10 | -- | -- | 10 |

Sumber : Intel Dasar Polres Metro Jakbar, 2009

Alat komunikasi guna mendukung operasional di lapangan digambarkan pada tabel 9 dimana terdiri dari HT (*Handy Transceiver*) sebanyak 6 unit, Telephone 3 unit, dan Faximile 1 unit. Kesemuanya dalam kondisi baik dan berfungsi.

Tabel 10
Inventaris Alat-alat Khusus Polres Metro Jakarta Barat

| NO | JENIS BARANG | KONDISI | | | JUMLAH |
|----|-----------------|---------|--------------|-------------|--------|
| | | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | |
| 1. | Borgol | 123 | -- | -- | 123 |
| 2. | Metal Detector | -- | -- | -- | -- |
| 3. | Com Phantombild | -- | -- | -- | -- |
| 4. | Teropong Malam | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Alat Pelacak | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Alat Deteksi | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 7. | Alat Photo TKP | 12 | -- | -- | 12 |
| 8. | Koper Endescope | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Koper Penerang | -- | -- | -- | - |
| 10. | Optical Camera | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Alat Penyadap | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Ultra Violet | 2 | -- | -- | 2 |
| 13. | Tekskit Narkotika | 1 | -- | -- | 1 |
| 14. | Mobil URC | 1 | -- | -- | 1 |
| 15. | Mobil Olah TKP | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Mesin Tik | 8 | 4 | 12 | 24 |
| 17. | Mesin Hitung | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Mesin Stencil | -- | -- | -- | -- |
| 19. | PC Computer | 21 | -- | -- | -- |
| J U M L A H | | 168 | 4 | 12 | 184 |

Sumber: Intel Dasar Polres Metro Jakbar, 2009

Tabel 10 menunjukkan daftar Inventaris alat-alat khusus pendukung tugas kepolisian yang dimiliki oleh Polrestro Jakbar, diantaranya Borgol (123 unit), Alat Photo TKP (12 unit), Ultra Violet (2 unit), Test kit Narkotika satu unit, Mobil URC satu unit, Mesin Ketik (8 unit), dan Komputer PC (21 set).

3. Penanganan Aksi Premanisme.

Sebagai salah satu wilayah yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi terutama aksi kriminalitas yang dilakukan oleh para preman, maka Polres Metro Jakarta Barat melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam menghadapinya. Salah satu upaya yang dilakukan terkait dengan aksi premanisme tersebut adalah dengan membentuk Unit Anti Premanisme, diluar dari struktur organisasi yang ada, dan personilnya diambil dari personil Unit Operasional atau Tim lapangan dari setiap Unit-Unit Sat Reskrirm. Dengan adanya Unit Anti Premanisme tersebut diharapkan bahwa aksi kriminalitas yang dilakukan oleh para preman dapat menurun baik secara kualitas maupun kuantitas. secara

teknis, penanganan aksi premanisme yang dilakukan oleh Unit Anti Premanisme Polres Jakarta Barat dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan operasi :

a. Operasi Rutin

Kegiatan operasi rutin merupakan kegiatan rutinitas operasi pemberantasan kejahatan dan aksi-aksi preman yang dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kondisi kerawanan di wilayah Jakarta Barat. Dalam mendukung kegiatan operasi ini, Unit Anti Premanisme Polres Jakarta Barat sudah mempunyai daftar target operasi yang akan dijadikan sasaran kegiatan operasi rutin tersebut. Umumnya target operasi pelaksanaan kegiatan ini adalah pada terminal-terminal bayangan dan sejumlah lahan tanah atau tempat-tempat usaha yang dijaga dan sering menjadi rebutan dan benturan antar kelompok preman.

b. Operasi Khusus

Kegiatan operasi khusus dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan dikendalikan Polda Metro Jaya, dengan menyiapkan sandi operasi, sasaran atau target operasi tertentu, waktu atau lamanya operasi, personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi berikut dukungan anggaran. Dan sebelum pelaksanaan operasi terlebih dahulu dilakukan kegiatan pelatihan bagi personil yang terlibat dalam pelaksanaan operasi dan personil yang dilibatkan selain personil dari Direktorat Reskriminal atau Reskrim Polda Metro Jaya juga melibatkan personil Satuan Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya yang dalam pelaksanaan operasi personil Satuan Reskrim merupakan kekuatan yang dikedepankan dan Polsek jajaran Polres Metro ikut memback-up dengan melakukan kegiatan imbalan, seluruh rangkaian kegiatan berikut hasil kegiatannya dilaporkan secara tertulis setiap hari ke Posko Operasi Polda Metro Jaya.

Pelaksanaan kegiatan operasi rutin maupun operasi khusus pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni memberantas berbagai bentuk kejahatan atau aksi premanisme yang terjadi di wilayah Jakarta Barat, yang membedakan dari kegiatan operasi tersebut adalah:

1) Waktu/Jadwal Pelaksanaan.

Waktu pelaksanaan kegiatan operasi rutin adalah dengan memperhatikan kondisi kerawanan wilayah, dan setiap saat operasi pemberantasan kejahatan dan aksi premanisme dapat dilakukan, sedang kegiatan operasi khusus waktu pelaksanaannya telah ditentukan.

2) Target Operasi

Target operasi dalam pelaksanaan operasi rutin adalah penindakan terhadap para pelaku kejahatan dan aksi premanisme pada jam-jam tertentu di daerah yang dianggap rawan, seperti terminal-terminal bayangan. tempat-tempat tertentu yang sering diperebutkan antar kelompok preman untuk mencari nafkah, yang sering menimbulkan konflik atau bentrokan antar kelompok preman, sedang target operasi dalam pelaksanaan operasi khusus lebih dipertajam dan harus terungkap selama pelaksanaan operasi.

3) Personil.

Personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi rutin diambil dari masing-masing personil yang bertugas di Tim-Tim Opsnal pada Unit-Unit yang ada dalam struktur organisasi Sat Reskrim dengan jumlah personil disesuaikan target operasi, sasaran dan tempat-tempat tertentu, dan jika sasaran dalam jumlah dan kualitas yang besar, personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi rutin

dapat menyertakan personil Satuan fungsi lain, sedang personil yang diturunkan untuk melakukan kegiatan operasi khusus adalah personil dari masing-masing Satuan Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya dengan jumlah yang telah ditentukan.

4) **Sistem Pelaporan**

Prosedur dan sistem pelaporan dari kegiatan operasi rutin dengan sasaran penanggulangan dan pembrantasan aksi-aksi premanisme dilakukan Perwira Sat Reskrim yang ditunjuk sebagai KA Tim Ops dengan membuat laporan secara tertulis dilaporkan kepada Kabag Operasi Polres Metro Jakarta Barat melalui Kaur Bin Ops Sat Reskrim, untuk diteruskan ke Polda Metro Jaya, sedangkan dalam kegiatan operasi khusus sistem pelaporan yang dilakukan adalah dengan menginventarisir data kegiatan dan hasil operasi oleh Bag Ops Polres Metro dan dilaporkan setiap hari selama operasi berlangsung dan laporan hasil operasi diteruskan ke Posko Ops yang ada di Biro Operasi Polda Metro Jaya, dengan mencantumkan pengungkapan Target Operasi (T.O), dan bilamana Target Operasi belum tercapai, maka Ka Tim Ops yang ditunjuk harus dapat mempertanggung jawabkan alasannya.

5) **Anggaran Kegiatan Operasi**

Anggaran untuk melakukan kegiatan operasi rutin adalah dengan menggunakan anggaran taktis yang tersedia di Polres Metro Jakarta Barat, sedang untuk anggaran kegiatan operasi khusus adalah anggaran dari Polda Metro Jaya.

Hasil Pelaksanaan Operasi Aksi Premanisme di Tahun 2009

Permasalahan yang dihadapi secara internal maupun external dan ikut mempengaruhi jalannya pelaksanaan Operasi, yaitu :

- 1) Kurangnya dukungan sarana dan prasarana
- 2) Keterbatasan Jabatan Perwira khususnya yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).
- 3) Kurangnya Perwira yang berpangkat IPDA/IPTU dalam jabatan, sehingga memberdayakan AIPDA/AIPTU yang statusnya Brigadir Polisi.
- 4) Kurangnya kesempatan untuk mengikuti Pendidikan pengembangan kemampuan Polri (Dikjur).
- 5) Masyarakat masih memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap kinerja Polri selama ini, khususnya di bidang pelayanan masyarakat terkait keresahan terhadap aksi premanisme.
- 6) Euforia kebebasan yang timbul sejak reformasi, sebagai contoh kebebasan pers yang tidak lagi memperhatikan nilai-nilai pribadi maupun etika masyarakat yang terkadang justru menjadi proses pembelajaran antar kelompok preman.
- 7) Tidak terjalannya komunikasi yang baik antar lintas sektoral dan tidak adanya program penanganan dari instansi lintas sektoral (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan aparat gakkum lainnya) yang selaras terhadap para preman yang dilimpahkan oleh Polri setelah dilaksanakan penindakan secara represif.

Sehingga hal ini dapat dilihat dari laporan Satuan Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Barat tentang hasil pelaksanaan penanganan aksi premanisme di Tahun 2009 namun kenyataannya sampai di awal Tahun 2010 aksi premanisme masih terus terjadi bahkan berkembang dengan

modus operandi yang cenderung bervariasi dan meningkat serta sangat meresahkan masyarakat.

1. Jumlah Tersangka dan Proses Penanganan

Tabel 11
Tersangka dan Proses Hukum

| NO | SATKER | JUMLAH KASUS | TERSANGKA | | |
|----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | TANGKAP | TAHAN | BINA |
| 1 | POLRES | 153 | 439 | 267 | 172 |
| 2 | TAMAN SARI | 167 | 771 | 221 | 550 |
| 3 | TAMBORA | 135 | 632 | 200 | 420 |
| 4 | TJ. DUREN | 189 | 810 | 272 | 542 |
| 5 | KB.JERUK | 114 | 401 | 184 | 217 |
| 6 | KEMBANG | 90 | 385 | 293 | 237 |
| 7 | KALIDERES | 76 | 358 | 140 | 190 |
| 8 | CENKARENG | 262 | 541 | 205 | 168 |
| 9 | PALMERAH | 71 | 305 | 170 | 194 |
| | JUMLAH | 1.257 | 4.642 | 1.952 | 2.690 |

Sumber : Polres Metro Jakarta Barat 2010

Tabel 11 menunjukkan jumlah kasus dan tersangka serta proses hukum yang dilakukan oleh Polrestro Jakbar dalam rangka penegakan hukum. Jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 1.257 kasus. Sedangkan untuk tersangka tertangkap tangan 4.642 orang, ditahan 1.952 orang, dan dibina sebanyak 2.690 orang.

2. Jenis Kejahatan Jalanan

Tabel 12
Kejahatan Jalanan

| NO | SATKER | JUMLAH KASUS | JENIS KEJAHATAN | | | |
|----|------------|--------------|------------------|-------|------|-------|
| | | | PERAS PREMANISME | COPET | JUDI | CURAS |
| 1 | POLRES | 153 | 80 | 3 | 43 | 16 |
| 2 | TAMAN SARI | 167 | 70 | 18 | 23 | 43 |
| 3 | TAMBORA | 135 | 64 | 19 | 22 | 33 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 4 | TJ. DUREN | 189 | 114 | 22 | 20 | 40 |
| 5 | KB.JERUK | 114 | 56 | 9 | 20 | 27 |
| 6 | KEMBANG | 90 | 50 | 9 | 12 | 18 |
| 7 | KALIDERES | 76 | 41 | 9 | 12 | 16 |
| 8 | CENGKARENG | 262 | 110 | 16 | 26 | 50 |
| 9 | PALMERAH | 71 | 46 | 2 | 10 | 18 |
| | JUMLAH | 1.257 | 631 | 107 | 188 | 251 |

Sumber : Polres Metro Jakarta Barat 2010

Tabel 12 menunjukkan jenis kejahatan jalana dan lokasi kejadian dimana jumlah kasus sebanyak 1.257 kasus terdiri dari pemerasan premanisme (631 kasus), Copet (107 kasus), Judi (188 kasus), dan Curas (251 kasus).

3. Barang Bukti Hasil Aksi Premanisme

Tabel 13
Barang Bukti Kejahatan

| NO | SATKER | JML KASUS | BARANG BUKTI | | | | |
|----|---------------|--------------|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | | UANG | SEN PI | SA JAM | RAN MOR | LAIN LAIN |
| 1 | POLRES | 153 | Rp 17.990.000 | | 5 | 4 | Hp SE,VER,Spd mtr |
| 2 | TAMAN SARI | 167 | Rp 24.971.500 | | 5 | 2 | 1 unit Tv,tas Ipod |
| 3 | TAMBORA | 135 | Rp 4.908.000 | | - | 5 | Tab Gas,VER |
| 4 | TJ. DUREN | 189 | Rp 34.784.550 | | 4 | 5 | Spd mtr,VER |
| 5 | KB JERUK | 114 | | | 7 | 7 | Senpi samurai |
| 6 | KEMBANG | 90 | Rp 2.598.500 | | 2 | 5 | Emas 90 gram, y mio ,VER |
| 7 | KALIDERES | 76 | Rp 4.675.000 | | 2 | 5 | |
| 8 | CENGKARENG | 262 | Rp 7.974.500 | | 15 | 4 | 2 bilah golok,VER |
| 9 | PALMERAH | 71 | Rp 1.493.000 | | 1 | 4 | 13 unit Cpu,VER |
| | JUMLAH | 1.257 | Rp113.973.050 | | 41 | 39 | |

Sumber : Polres Metro Jakarta Barat 2001

Tabel 13 menguraikan tentang Barang Bukti Kejahatan yang terdiri dari Uang Tunai (Rp. 113.973.050,-), Senjata Tajam (41 buah), Kendaraan Bermotor (39 unit).





BAB III

TEMUAN PENELITIAN.

1. Organisasi Preman dan Bentuk Kegiatannya.

a. Faktor Terjadinya Tindakan Premanisme.

Korelasi antara faktor kepadatan penduduk yang multikultur dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di wilayah Jakarta Barat menumbuhkan rasa kebersamaan dikalangan masyarakat tertentu, biasanya mereka akan membentuk kelompok-kelompok dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, sedang disisi lain ada sekelompok masyarakat mempertontonkan gaya hidup yang konsumtif dan cenderung berlebihan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Disisi lain ada individu-individu atau kelompok orang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan pintas, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan tergolong perbuatan melanggar hukum.

Menurut Kamil Razak, Kapolrestro Jakarta Barat mengatakan bahwa:

“..kompetisi untuk memperebutkan sumberdaya di wilayah kerja saya ini sangat tinggi. Hal ini bisa saudara lihat dari banyaknya kasus tindak pidana baik yang dilaporkan ke kita maupun tidak. Kehidupan masyarakat Jakarta Barat khususnya yang mendekati atau sekitar pusat perekonomian, misalkan Glodok, Roxy, dan wilayah pemukiman elit eksklusif. Kondisi ini yang memicu adanya gangguan kamtibmas dan konflik-konflik kecil.

Kemajuan yang sangat pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus transformasi informasi melalui berbagai media cetak maupun elektronik ikut mempengaruhi dan mewarnai beragamnya modus operandi tindak kejahatan yang timbul. Dan kejadian yang dianggap menonjol dan cukup meresahkan masyarakat di wilayah Jakarta Barat adalah aksi-aksi premanisme yang dilakukan dengan oleh individu

maupun kelompok-kelompok preman dengan cara memeras, menakut-nakuti, menodong atau merampas hak-hak orang lain. Dalam bentuk kelompok para pelaku premanisme ini sering dimanfaatkan pihak tertentu sebagai alat untuk menagih hutang yang lazim disebut *Debt Collector*, atau menguasai lahan tanah sengketa, jasa keamanan Ilegal khususnya ditempat-tempat hiburan malam dan pusat-pusat keramaian, bentuk aksi-aksi premanisme lainnya yaitu yang dilakukan dalam kendaraan angkutan umum atau Bus dengan dalih mengamen sambil meminta uang disertai ancaman (psikis dan fisik), Mengutip uang dari para pedagang dipasar-pasar Tradisionil, praktek percaloan atau *Timer* di pangkalan-pangkalan Mikrolet dan Angkot, meminta uang secara paksa sambil mengancam terhadap pengendara mobil di Lampu Merah menggunakan Golok, badik atau kapak, menggedor-gedor kaca atau pintu mobil.

Hal ini dikuatkan oleh Agung Wibowo, Kanit Kriminal Umum Sat Reskrim Polrestro Jakbar sebagai berikut:

“.....lokasi terminal, pasar, mall atau jalan yang ramai lalu lalang manusia sangat rawan dengan pemalakan, penodongan, dan pencopetan. Kami telah antisipasi dengan melakukan *undercover* untuk terjun langsung di lokasi tersebut. Namun mereka lebih pintar, ada yang memberi tahu bahwa ”*plokis*” (istilah mereka untuk polisi) di sekitarnya, otomatis mereka menggeser area operasinya. Hal ini mengakibatkan efektifitas penanggulangan kejahatan ”marginal” agak terkendala...”

Penindakan terhadap pelaku kegiatan premanisme meskipun terus menerus dilakukan aksi premanisme tetap ada sepanjang masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Preman dan premanisme lahir adalah akibat dari kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Ardian, salah satu sumber informasi yang sekaligus sebagai anggota Polri yaitu Ka Sub Unit Kejahatan dan Kekerasan Sat Reskrim Polrestro Jakbar, mengatakan:

”...mereka itu kuat secara fisik dan mental, padahal ketika tertangkap masa dan digebukin sampai babak belur, namun begitu anggota kita tiba dan membawanya ke kantor Polres, sampai ditempat kayak nggak terjadi apa-apa. Tidak ada rintihan, meskipun ada luka, darah yang mengering dan memar. Mereka gak ada jeranya, meski setelah hukuman dijalani tidak jarang 2 hari kemudian melakukan kejahatan lagi...dan tertangkap....”

Penyebab maraknya premanisme adalah karena tekanan ekonomi, dimana dalam keadaan tertentu orang atau warga masyarakat bisa melakukan apa saja guna mempertahankan kehidupannya, dan bagi pengangguran tekanan hidup sehari-hari yang begitu keras akan menimbulkan rasa putus asa yang pada gilirannya akan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

b. Kelompok Preman.

Kegiatan kelompok preman di beberapa tempat, seperti terminal, lampu merah, stasiun kereta api, pasar, perparkiran di komplek-komplek perumahan, ruko, perkantoran. tempat-tempat keramaian, tempat-tempat hiburan malam (Bar, Cafe, Diskotik, Panti Pijat), tanah atau lahan sengketa merupakan suatu bentuk persaingan yang dilakukan untuk memperoleh status terpandang (Nitibaskara, 2001:49). Dalam mengekspresikan diri secara verbal berusaha menonjolkan diri agar dihormati orang lain. Cara yang ditempuh untuk memperoleh penghargaan tersebut dapat menjurus kepada ancaman psikis, fisik dan kekerasan. Karena itu menjadi preman atau melakukan pencurian atau pemalakan sehingga mendapatkan uang, bisa meningkatkan status, pelaku kejahatan yang meniti karir mulai dari bawah dan setelah menjadi perampok, biasanya mereka akan pindah dan berdomisili ditempat lain, tetapi nilai-nilai lama masih tetap dibawa dan dihayatinya.

Alexander, merupakan salah satu anggota preman yang pernah berurusan dengan Polresta Jakbar karena melakukan tindak pidana mengatakan:

“.....kami ini orang susah, tapi kami harus hidup. Kerjaan yang bisa dilakukan adalah begini, yaa...mau nggak mau harus dilakukan. Kalo mau jujur kerjaan ini enteng dan hasilnya lumayan untuk menutupi kebutuhan hidup dan masih bisa kami mabuk dan beli WTS model apa saja. Kalo yang mahal, kita cari GMnya untuk minta gratisan atau diskon dengan sedikit ancaman.

Dikelompok harus eksis, kalo nggak gitu kita diinjek-injek ama yang kuat atau hasil kita harus disetor ke Boss gede baru kita dapat sedikit....capek, dech...makanya di kelompok ini paling tidak kita dituakan lah, kalo kita nggak kerja pasti dapat bagian dari junior-junior kita yang baru belajar jadi preman.....”

Untuk mendapatkan penghargaan atau status diantara kelompok preman sering terjadi konflik atau benturan kepentingan, yang biasanya berakhir dengan bentrokan fisik dan jatuh korban, dan kejahatan yang dilakukan kelompok-kelompok preman di wilayah Jakarta Barat, yaitu;

1) Kelompok preman yang menguasai atau menjaga lahan sengketa.

Ungkapan dari Gerenimus salah satu anggota kelompok yang menguasai tanah sengketa di Gang Sumur Cengkareng mengatakan:

“...untuk mendapatkan obyekan bisnis jaga lahan ini, kami mesthi berantem dulu dengan kelompok lain khususnya yang *membacking* pihak yang bersengketa. Kalo kami kalah secara fisik, kami upayakan lewat hukum, kalo masih kalah juga, kita tambah kekuatan. Karena kita menggerakkan anggota ini butuh dana dan harus disesuaikan dengan dana dari yang nyuruh kita....”

2) Kelompok preman sebagai penagih hutang (*Debt Collector*).

Hapeles dan Bonepatius, keduanya adalah anggota preman spesialis penagih hutang yang pernah berurusan dengan hukum karena melanggar Pasal 335 ayat (1) yaitu pemaksaan dan Pasal 167 (masuk

pekarangan orang tanpa ijin) hampir sepakat bahwa pekerjaan penagih hutang itu gampang-gampang susah. Pekerjaan ini bersifat terbuka, sebagai mana diungkapkan berikut:

“...biasanya kalo kami menuju sasaran melakukan koordinasi dengan pengurus setempat terlebih dahulu, namun ini juga nggak tentu tergantung *feeling* kita aja. Kalo dirasa aman langsung masuk. Rumus utama adalah kita tidak boleh melakukan penganiayaan fisik, namun harus menjatuhkan mental orang yang ditagih. Misalnya membentak, gebrak meja tapi tidak sampe rusak, atau melakukan tekanan dengan kata-kata. Tidak jarang kami jadi tontonan warga, bahkan kami pernah dipukuli karena dianggap akan merampok. Tapi itu semua resiko dari tugas ini.....”

- 3) Kelompok preman meminta jasa keamanan di lahan parkir diletakkan ditempat-tempat hiburan malam.

Sumber informasi Tabroni, preman yang beroperasi di wilayah Tamansari mengatakan:

“...kami gak punya lahan, tapi punya kelompok. Kerjanya hanya seakan membina parkir liar yang ada di lokasi hiburan malam. Pertama kali kami beroperasi mendapat perlawanan, tapi begitu tau kekuatan mereka, kami turunkan anak buah lebih banyak dan akhirnya mereka kalah. Kemenangan ini yang menjadikan pendapatan kelompok kami. Setiap malam ada bagian yang menarik jatah...kemudian dikumpulkan dan baru dibagi.....”

- 4) Kelompok preman mengutip uang pedagang pasar tradisional

Tabroni salah satu preman Pasar Slipi mengatakan bahwa:

”.....biasanya para pedagang yang tidak punya lapak itu paling gampang dimintai uang, karena kalo nggak mereka takut digusur oleh Keamanan Pasar yang resmi. Mereka menganggap kita ini kepanjangan tangan Keamanan Pasar. Itulah untungnya....kita nggak pernah maksa...cuman kalo dua kali, tiga kali, nggak ngasih....pasti akan kita bikin resek....”

- 5) Kelompok preman diatas kendaraan umum yang pura-pura jadi pengamen dan meminta uang dengan ancaman psikis, menodong dan merampas barang penumpang.

Menurut Nyoman, salah satu anggota Buser Sat Reskrim Polrestro Jakbar tentang preman yang beroperasi di atas kendaraan umum jurusan Kalideres-Tangerang:

“.....modus mereka itu pura-pura mengamen di kendaraan kemudian menyodorkan plastik untuk meminta uang jasa. Namun kalo tidak diberi mereka gak segan-segan untuk memaksa bahkan menodong. Mereka itu cepat banget *escapenya* karena memang hapal dengan lokasi untuk melarikan diri. Kayak belut mereka itu, licin begitu tertangkap mereka tutup mulut untuk semuanya..kadang menyulitkan untuk mengembangkan untuk membongkar jaringannya...”

- 6) Kelompok preman di komplek-komplek pemukiman atau perumahan, meminta uang jasa mengantar tamu atau pembawa barang.

Ropik yang berprofesi sebagai kuli angkut di Puri Kembangan yang sebenarnya adalah salah satu anggota kelompok Preman, mengatakan:

“.....kami ini bukan preman, kami khan jual tenaga untuk membantu warga yang gak bisa menganangkat barangnya untuk dipindahkan. Masalah ongkos itu gak memaksa tapi yaa harus cocok dengan tenaga yang dikeluarkan..jadi nggak ada itu yang dibilang disini ada preman angkut barang.....”

Namun hal ini dibantah oleh salah satu warga Puri Kembangan, Arnold, menurutnya:

“.....preman angkut disini ini tega-tega semua....masak ngangkut barang 10 meter dan enteng minta 25 ribu.....padahal orang yang punya barang sebenarnya gak perlu bantuan. Gini ini akhirnya khan yang punya nama jelek masyarakat sini. Dulu pernah di razia, namun hasilnya gak memuaskan...selang 4 hari mereka sudah beroperasi lagi.....”

- 7) Kelompok preman sebagai Calo atau Timer, mengutip uang jago dari pengemudi mobil angkot di terminal-terminal bayangan.

Menurut keterangan salah satu Sopir Bus jurusan Jakarta-Merak di terminal bayangan Tomang mengatakan:

“.....kami ini serba salah, kalo nggak ngetem di Tomang nggak dapet penumpang, Tapi kalo cari penumpang di Tomang, japrem (jatah preman) gede banget....sekali ngetem bisa abis 5 ribu....padahal cuman dapet penumpang 3 orang....kalo mau terus kadang dihadang atau harus ngasih uang jago 2 ribu.....”

Terminal bayangan ini menimbulkan permasalahan kerawanan tersendiri khususnya jalan umum menjadi macet. Akhirnya, copet juga beroperasi di wilayah ini sebagai implikasi dari penumpukan lalu lintas orang yang akan naik kendaraan umum.

c. Modus operandi.

Banyaknya kelompok-kelompok preman yang melakukan aksi-aksi premanisme atau kegiatannya di wilayah Jakarta Barat mempunyai modus operandi yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena masing-masing individu preman atau kelompok-kelompok preman mempunyai latar belakang, budaya atau pola kehidupan yang berbeda, dan tidak selalu sama.

Menurut Pujiharto, Wakasat Reskrim Polrestro Jakbar, mengatakan:

“.....misalnya.....kelompok Hercules dalam merekrut anggotanya selain dari etnis Ambon atau Flores, juga dari etnis-etnis lainnya, yaitu Jawa, Sumatera dan Sulawesi, sehingga aksi-aksi premanisme yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah hutang-piutang dengan menjadi *Debt Collector* ataupun menyelesaikan kasus sengketa tanah, cenderung lebih mendahulukan penyelesaian secara musyawarah, dengan tetap memberikan sinyal adanya penekanan atau ancaman psikis agar kesepakatan-kesepakatan yang muncul adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki, tetapi bila tidak ada kesepakatan ataupun persesuaian, dipastikan akan terjadi tindakan kekerasan yang mengakibatkan jatuh korban.....”

Sedang kelompok Martin Neparasi, spesialis *Debt Colletor* anggota kelompoknya sebagian besar dari etnis Indonesia Timur, seperti Ambon, Timor dan Flores. Menurut, Steven Otomusu, salah satu anggota kelompok ini, dikatakan:

“.....bila terjadi pembicaraan sebagai upaya penyelesaian maka harus mengikuti kemauan atau kehendak mereka, bila tidak ada persesuaian dipastikan akan terjadi keributan atau penganiayaan penyanderaan. Dan bilamana yang dihadapi sama-sama memakai atau menggunakan jasa preman dari kelompok tertentu, bentrokan fisik dipastikan juga tidak akan terhindarkan...”

Hal ini dimungkinkan karena kelompok-kelompok preman Martin Neparasi sangat memegang prinsip dan melaksanakan yang diinginkan pemberi kuasa.

Kelompok preman lainnya yang mengutip uang jago pada pangkalan angkot atau terminal-terminal bayangan maupun kelompok preman yang mengutip uang dari para pedagang di pasar tradisional, memiliki modus operandi yang sama, dan uang hasil kutipan tersebut selain dibagi-bagi kepada kelompoknya juga diberikan kepada oknum petugas keamanan resmi, yang oknum petugas tersebut sewaktu-waktu dapat dimintakan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap diri preman.

Untuk menangani kelompok-kelompok premanisme yang cukup besar jumlahnya Polres Metro Jakarta Barat selain mengedepankan Satuan Reskrim juga melibatkan personil dari Satuan Intel, Satuan Samapta dan unsur operasional Polsek jajaran Polres Metro Jakarta Barat, dan jika kondisi memaksa maka meminta bantuan personil Brimob Polda Metro Jaya.

Dalam penelitian diwilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dapat digolong-golongkan berbagai kelompok preman yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan kepentingannya, sehingga tindakan premanisme yang

dilakukan dapat dijadikan langkah awal operasional Kepolisian untuk memberantas aksi premanisme di wilayah Jakarta Barat. Dengan demikian diharapkan aksi premanisme yang akhir-akhir ini terjadi dan sangat meresahkan masyarakat dapat diminimalisir. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan penelitian ini, maka selain teori yang telah disebutkan diatas, penulis juga akan menggunakan beberapa kajian kepustakaan sebagai berikut; Manajemen premanisme, Organisasi, Fungsi dan Peran Polri.

Menyikapi perkembangan situasi kriminalitas dengan berbagai bentuk modus operandinya, Satuan Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Barat yang merupakan bagian dari struktur Organisasi tugas Kepolisian diwilayah hukum Jakarta Barat, mempunyai tugas pokok yaitu, bersama-sama dengan satuan kerja fungsi lain, yaitu Satuan fungsi Narkoba, Intelkam, Samapta, Lantas, Binamitra, Bagian Ops dan unsur satuan unit Polsek dalam jajaran Polres Metropolitan Jakarta Barat bekerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta Barat berupaya melakukan penindakan terhadap kegiatan dan aksi premanisme sesuai ketentuan perundangan.

Menurut Sutoyo, Kasat Samapta Polrestro Jakbar, mengatakan:

“.....dalam memberantas aksi premanisme dengan melakukan operasi kepolisian yang bersifat rutin maupun khusus, dalam hal menindak lanjuti hasil operasi terhadap orang-orang yang berdasarkan hasil penyelidikan adalah sebagai premanisme, pada saat tertangkap sedang tidak melakukan kegiatannya atau belum diperoleh bukti-bukti telah melakukan suatu perbuatan pidana namun tidak memiliki bukti identitas diri yang jelas, sehingga untuk proses pembinaannya diserahkan kepada Dinas Sosial Pemda Kotamadya Jakarta Barat....”.

Sedang bagi yang terbukti telah melakukan suatu perbuatan pidana dan memenuhi syarat juridis untuk dikenakan tindakan penahanan, maka

dikenakan tindakan penahanan dan diproses untuk diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum guna proses persidangnya.

2. Bentuk Kegiatan Premanisme.

Dalam menyikapi dan menghadapi berbagai gangguan kriminalitas yang dari tahun ketahun cenderung mengalami peningkatan baik aspek kuantitas maupun kualitas, dengan modus operandi yang semakin bervariasi, maka Polres Metro Jakarta Barat dituntut untuk dapat memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, oleh karenanya tindakan penangkapan para preman atau orang-orang yang diduga sering melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat melalui kegiatan operasi dengan mengedepankan fungsi Satuan Reskrim, dan mengerahkan kemampuan yang ada meliputi, Satuan Samapta, Satuan Intelijen, Satuan Narkoba, Satuan Lantas serta unsur Staf dan jajaran Polsek kewilayahan, yang terdiri dari Polsek Metro Tamansari, Tambora, Tanjung Duren, Palmerah, Cengkareng, Kalideres, Kebon Jeruk dan Polsek Metro Kembangan.

Menurut penulis yang sekaligus sebagai Kasat Reskrim Polrestro Jakbar bahwa beroperasinya kemampuan dan kekuatan tersebut dapat dikatakan bersifat rutin sesuai prosedur dan doktrin yang ada dan merupakan bagian dari langkah konkret terkait dengan komitmennya sebagai Institusi pelayanan publik. Dari data pencapaian hasil kegiatan operasi penindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sangat meresahkan dan tergolong perbuatan melanggar hukum atau perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara diantaranya adalah :

- a. Aksi premanisme terkait dengan keinginan dari orang-orang tertentu atau para pihak yang merasa mempunyai hak atas suatu bidang tanah namun ada pihak lain yang juga merasa mempunyai hak atas bidang tanah yang sama, dan salah satu pihak berusaha untuk menguasai fisik tanah atau lahan sengketa dengan cara menyuruh kelompok-kelompok preman,

padahal dilokasi tanah sudah diduduki atau dikuasai pihak lawan dengan menempatkan orang-orang yang juga dari kelompok preman lainnya, kelompok preman tersebut umumnya ada yang mengkoordinir dan memimpin dan cukup terorganisir, diantara kelompok preman tersebut yaitu :

- 1) Kelompok preman yang dikoordinir Hercules, menurut Jhon Alpes (salah satu anggota) jumlahnya berkisar antara 100 s/d 200 orang, terdiri dari etnis Ambon dan Timor dengan menyertakan preman lokal dari etnis Betawi dan Jawa, rata-rata perorang dari kelompok preman tersebut menerima upah perhari berkisar antara Rp 50.000 Rp 100.000,- dalam kasus penguasaan lahan atau tanah sengketa di komplek Perumahan Citra V Kalideres Jakarta Barat
 - 2) Menurut Yopii Rayaan, salah satu anggota Kelompok preman yang dikoordinir Ignatius Ago dan Gerenimus Jerado, menyatakan bahwa jumlah anggota kelompok berkisar antara 20 s/d 40 orang, terdiri dari etnis Ambon dan Timor, menerima upah rata-rata berkisar antara Rp 50.000 s/d Rp 100.000 perorang dalam kasus penguasaan lahan atau tanah sengketa di Gg Sumur II Pertamina Cengkareng Jakarta Barat, yang menyebabkan perlawanan dan jatuh korban.
 - 3) Sedangkan Misnen salah satu anggota Kelompok preman yang dikoordinir M. mudjeni (Kelompok Betawi) dan Ongen (Kelompok Ambon), hampir menyatakan pendapat yang sama bahwa jumlah anggotanya berkisar antara 70 s/d 100 orang, menerima upah rata-rata berkisar antara Rp 50.000 perorang dalam kasus penguasaan lahan atau tanah sengketa dengan cara merusak pagar di Jalan S. Parman Kav No 3 Tanjung Duren.
- b. Aksi premanisme terkait dengan tuntutan pembayaran upah sebagai pekerja dengan masuk secara paksa, merusak dan menguasai gedung dan

perkantoran, yang dikoordinir Edison dan M. Jamil dengan jumlahnya 40 orang, terdiri dari etnis Ambon, Manado, Irian dan Jawa, di Ruko Ketapang Indah Blok D.2/12 Krukut Tamansari Jakarta Barat.

- c. Aksi premanisme sebagai penagih hutang (debt Collector) dengan mendatangi, masuk dan menduduki halaman rumah korban secara beramai-ramai berkisar antara 30 s/d 50 orang dari etnis Ambon dan Timor yang dikoordinir Martin Neparasi, di Perumahan Taman Semanan Indah Cengkareng.

Dalam melakukan aksinya koordinator kelompok preman tersebut memperoleh order dari para pihak yang berkepentingan, yang sebelumnya didahului dengan negosiasi atau kesepakatan-kesepakatan tentang tujuan menyewa atau mengerahkan kelompok preman, jumlah dan biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan tata cara atau bagaimana kelompok preman tersebut melakukan kegiatannya pihak pemberi order tidak ikut campur dan sepenuhnya diserahkan dan menjadi tanggung jawab koordinator kelompok preman atau ketua kelompok preman.

Kondisi perjanjian kerja sama ini menurut Immanuel Sandi, salah satu anggota kelompok Martin Neparasi, dikatakan:

“.....kesepakatan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis berupa Surat Kuasa kepada koordinator atau Ketua kelompok preman “ Untuk menyelesaikan sesuatu masalah “ (misal sengketa tanah atau menagih hutang), Dan besarnya prosentase atau upah serta biaya yang akan diterima oleh Koordinator Kelompok Preman hanya diketahui oleh pemberi order dan Koordinator atau Ketua Kelompok preman, sedang anggota-anggota kelompok preman umumnya memahami kondisi tersebut.....”

Selanjutnya dikatakan,

“....dengan hanya menerima upah harian dari koordinator yang besarnya disesuaikan dengan tugas dan kewajiban para preman, dimana preman yang ditugaskan sebagai koordinator lapangan dengan pelaksana akan menerima upah yang berbeda dari ketua

Kelompok. Bilamana kesepakatan antara pemberi order dengan Koordinator kelompok preman berjalan sesuai rencana yang disepakati, maka pemberi order akan memberikan sepenuhnya biaya sesuai yang disepakati, sedang jika permasalahannya adalah penyelesaian hutang, maka biaya yang diberikan sesuai prosentase yang disepakati berkisar antara 40 % sampai dengan 50 % dari besarnya nilai tagihan...”.

Bila dalam hal penguasaan tanah sengketa atau penyelesaian hutang terjadi perlawanan atau menimbulkan permasalahan hukum yang mengakibatkan anggota kelompok preman ditangkap atau diamankan petugas Polisi, Ketua Koordinator Kelompok preman yang sebelumnya telah mempelajari setiap order yang diterima, menghubungi para Pengacara atau Kuasa Hukum yang memang sudah disiapkan untuk menyelesaikan serta mendampingi anggota Kelompok preman yang diamankan petugas.

Kecendrungan mengerahkan kelompok-kelompok organisasi massa seperti Front Betawi Rempug FBR, Forum Komunikasi Anak Betawi Forkabi, Kelompok Banten dalam hal penguasaan atau penyelesaian sengketa tanah/lahan kondisi saat ini semakin meningkat, karena para pihak yang berkepentingan dengan lahan atau tanah sengketa lebih mudah mengontrol atau mengajak komunikasi dengan pimpinan organisasi massa yang mempunyai akses ke Intansi terkait. Dan benturan atau bentrokan fisik dengan kelompok lainnya yang berusaha masuk dengan paksa ke areal lahan/tanah sengketa akan lebih mudah dicegah melalui dialog antar pimpinan kelompok.

Tindakan mengancam atau mengusir orang-orang yang menjaga lokasi tanah, masuk dengan cara paksa dengan merusak pagar atau pintu pagar, merobohkan plang atau memasang plang baru, mengganti kunci pintu atau gembok dan memasang kunci baru, merusak bedeng dan mendirikan bedeng atau bangunan semi permanen, sering diwarnai dengan

terjadinya perlawanan dari penjaga atau orang atau kelompok orang yang sejak awal ditugaskan menjaga atau menguasai dan menempati lahan/tahan sengketa, akan mengakibatkan jatuh korban dari kedua belah pihak baik luka-luka ataupun meninggal dunia akibat pukulan benda tumpul atau luka akibat senjata tajam.

- d. Kelompok preman yang berusaha mengambil alih jasa keamanan atau lahan parkir ditempat-tempat hiburan malam, Diskotik, Cafe, Bar dan Panti Pijat yang sebelumnya telah dikelola atau dikuasai kelompok preman tertentu. Hasil pengamatan di lapangan dan wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa sumber informasi dapat dielaborasi sebagai berikut:
- 1) Kelompok Jarot (Arek) versus Kelompok Martin (Ambon), memperebutkan jasa pengamanan di Diskotik Crown Tamansari.
 - 2) Kelompok Edo Cs (Menado) versus Kelompok Yopie (Ambon Key) memperebutkan jasa pengamanan di lokasi tempat permainan Mickey Mouse Mangga Besar Tamansari.
 - 3) Kelompok Daeng Acung (Makasar) versus Kelompok Jeni (Betawi).memperebutkan jasa pengamanan di Diskotik Jalan Tb Angke Tanjung Duren.
- e. Mengutip uang dari para pedagang dipasar-pasar tradisional yang dilakukan kelompok terdiri dari 3-5 orang yang dikenal sebagai Jawara pasar, dari etnis Betawi, Banten dan Madura, di Pasar Cengkareng, pasar Palmerah, pasar Angke, pasar Jati Pulo, pasar Hipli Tanjung Duren, Pasar Kemiri Kembangan.
- f. Kelompok terdiri dari 2 s/d 5 orang etnis Betawi di Komplek Pemukiman berusaha meminta imbalan dengan cara ancaman atau kekerasan psikis, terhadap penghuni Komplek atau tamu penghuni Komplek dengan dalih

- jasa membantu, mengamankan, mengantar membawa barang, sering menimbulkan keributan dan meresahkan warga masyarakat secara umum.
- g. Kelompok terdiri 2 s/d 5 orang dari Etnis Jawa dan Betawi yang bertindak sebagai Calo atau Timer, meminta uang jago kepada para pengemudi angkutan umum ditempat mangkal, ngetem dan Terminal tertentu.
 - h. Kelompok terdiri 2 s/d 5 orang etnis Batak dan Jawa, yang beroperasi diatas kendaraan angkutan umum dengan terang-terangan meminta bantuan sumbangan dari penumpang Bus, Kopaja atau Angkot dengan menyebut-nyebut dirinya sedang mengalami kesulitan hidup, baru keluar dari penjara disertai dengan penampilan, sikap dan ucapan yang dapat dan terkesan menmbulkan rasa takut.
 - i. Kelompok atau orang-orang tertentu yang berpura-pura membantu mengatur lalu lintas (Pak Ogah) pada pertigaan atau putaran jalan, dan meminta imbalan uang dengan paksa dengan mengedor-gedor Kap atau Jendela mobil korban.
 - j. Kelompok atau orang-orang tertentu yang berpura-pura sebagai pengamen, pengemis, penjaja koran, pedagang asongan di-lampu merah dalam kesempatan tertentu melakukan aksinya melakukan pemerasan yang disertai ancaman dengan meminta uang sambil menodongkan pisau, mengacungkan golok atau Kapak, merampas Hand Phone, Dompot dan atau Tas milik korban pengemudi mobil pribadi khususnya korban perempuan.
 - k. Kelompok penabur paku atau benda kecil tajam lainnya dijalan tertentu yang sepi, bertujuan agar pengemudi mobil atau motor, khususnya mobil pribadi menghentikan mobilnya karena Ban kempes akibat terkena ranjau paku, kemudian dihipiri dan berpura-pura membantu, saat lengah, maka barang yang ada dimobil diambil atau pelaku menodongkan senjata tajam dan merampas barang milik korban. Untuk menangani kelompok-

kelompok premanisme yang cukup besar jumlahnya Polres Metro Jakarta Barat selain mengedepankan Satuan Reskrim juga melibatkan personel dari Satuan Intel, Satuan Samapta dan unsur operasional Polsek jajaran Polres Metro Jakarta Barat, dan jika kondisi memaksa maka meminta bantuan personel Brimob Polda Metro Jaya.

1. Dalam penelitian di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dapat digolong-golongkan berbagai kelompok preman yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan kepentingannya, sehingga tindakan premanisme yang dilakukan dapat dijadikan langkah operasional Kepolisian untuk memberantas premanisme di wilayah Jakarta Barat.

3. Penanganan Premanisme oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Konstruksi suatu proses penanganan aksi-aksi premanisme di wilayah Jakarta Barat oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat selaku salah satu pengemban fungsi Kepolisian, adalah upaya untuk memberantas dan mengungkap berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan para preman, dengan menggelar operasi-operasi kepolisian baik yang dilakukan secara tertutup maupun terbuka, bersifat operasi rutin dan operasi khusus atau melakukan kegiatan rutin dengan menempatkan personel pada daerah, Jam dan titik rawan tertentu yang bersifat mobile yang dikendalikan dari Pos-Pos Polisi yang ada atau tempat-tempat lainnya yang dijadikan sebagai Tempat Pertemuan dan Konsolidasi yang biasa disebut TPK Reserse.

a. Pembentukan Unit Anti Premanisme Terpadu

Sebagai salah satu wilayah yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi terutama aksi kriminalitas yang dilakukan oleh para preman, maka Polres Metro Jakarta Barat melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam menghadapinya. Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan terkait dengan aksi premanisme tersebut adalah dengan membentuk Unit

Anti Premanisme Terpadu dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif dengan mengantisipasi Ambang Gangguan (FKK), Potensi Gangguan (PH) dan Gangguan Nyata (AF).

Menurut Pujiharto, Kasat Reskrim Polrestro Jakbar:

“....Keberadaan Unit Anti Premanisme Terpadu yang dibentuk tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat kriminalitas dan aksi-aksi kriminalitas yang dilakukan oleh para preman baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara teknis, penanggulangan aksi premanisme yang dilakukan oleh Unit Anti Premanisme Terpadu Polres Metro Jakarta Barat dengan mengedepankan Pola Kerjasama dengan masyarakat..”.

Masyarakat yang pada hakekatnya adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur, baik masyarakat pengusaha, masyarakat pengunjung, masyarakat pemukiman, masyarakat pekerja, masyarakat pengguna dan pemakai jasa termasuk aparat pemerintah mulai dari pelaksana pemerintahan yang terkecil yaitu Kelurahan hingga Kotamadya selain kerjasama dengan para penegak hukum lainnya, dan pembentukann Unit Anti Premanisme Terpadu tersebut diatas harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergis satu sama lain dalam kurun waktu yang ditentukan dengan skala prioritas, waktu dan sasaran yang mengacu pada Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Barat.

1) Rekrutmen

Personil Unit Anti Premanisme Terpadu diambil dari personil dalam struktur organisasi tugas Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Unit ini memiliki ketrampilan dalam hal beladiri, kemampuan menembak, ketrampilan berkendara roda dua dan roda empat serta kemampuan untuk melakukan kegiatan penyelidikan khususnya yang ditempatkan pada Tim-Tim operasional.

Menurut Rusmiati, Kaur Binops Sat Reskrim Polrestro Jakbar, dikatakan bahwa:

“.....dari setiap Unit Satuan Reskrim dan bertugas hanya melakukan penindakan atau upaya paksa dalam bentuk observasi, pengejaran, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang seluruh hasil penindakan dilaporkan dan diserahkan ke Tim Pemeriksa Unit Sat Reskrim atau Tim Unit Pemeriksa Polsek jajaran Polres Metro Jakarta Barat yang menangani perkaranya yaitu :

- 1). Personil Tim Operasional dari Subnit Jatanras dan Subnit Judi Susila yang berada pada Unit Kriminal Umum (Krimum).
- 2). Personil Tim Operasional dari Unit Kendaraan Bermotor (Ranmor)
- 3). Personil Tim Operasional dari Unit Reserse Mobil (Resmob).

2) Kegiatan dan Cara Bertindak

Kegiatan personil Tim-Tim Operasional Unit Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat yang dalam penugasannya telah dibagi-bagi atau *diplotting* pada satu wilayah atau daerah tertentu yang menjadi tanggung jawab pengawasannya sesuai dengan situasi kerawanan daerah dan terkait dengan tugas pokok unit-nya masing-masing.

Sesuai ketentuan yang telah disepakati, menurut Pujiharto, Wakasat Reskrim Polrestro Jakbar, mengatakan:

“.....kegiatan Tim-Tim Opsnal dilakukan melalui Tempat Pertemuan Konsolidasi Reserse atau dengan sebutan TPK Reskrim, yang biasa digunakan untuk melakukan penyusunan rencana kegiatan dan operasional atau penindakan, dimana setiap personil dari Tim-Tim Operasional tersebut diharuskan memiliki kemampuan dan mempunyai data perorangan yang dapat memetakan wilayah pengawasannya meliputi daerah-daerah atau tempat-tempat rawan, jam-jam rawan, modus operandi yang biasa digunakan para pelaku kejahatan atau kelompok premanisme tertentu, tempat persembunyian dan tempat-tempat pelemparan hasil kejahatan....”

Disamping itu penting bagi Tim Opsnal untuk mengetahui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh ormas Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Front Betawi Rempug (FBR), Front Pembela Islam (FPI), Kelompok Preman dari Etnis tertentu, Kelompok Hercules, Kelompok Jhon Key, Kelompok Daeng, Kelompok Djarot, Kelompok Martin Separasi, Kelompok Djaeni dan personil operasional dari Polsek jajaran atau dari personil Satuan Fungsi Lain dan unsur pengamanan lainnya.

Adapun Tempat Pertemuan Konsolidasi Reserse (TPK), meliputi :

- 1) Tim Opsnal Subnit Jatanras Krimum dengan TPK Pos Pol Jati Pulo,
- 2) Tim Opsnal Subnit Judsus Krimum dengan TPK Pos Pol Mangga Besar
- 3) Tim Opsnal Unit Ranmor dengan TPK Pos Pol Kedoya dan Pos Pol Pesing
- 4) Tim Opsnal Unit Resmob dengan TPK Pos Pol Terminal Grogol

b. Kegiatan Rutin Kepolisian

Kegiatan rutin Kepolisian dalam hal penanggulangan aksi premanisme dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kondisi kerawanan di wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Menurut Kamil Razak, Kapolrestro Jakbar mengatakan:

“.....dalam mendukung kegiatan ini Unit Anti Premanisme Terpadu Polres Metro Jakarta Barat sudah mempunyai daftar target yang akan dijadikan sasaran kegiatan rutin tersebut. Umumnya Daftar target dan sasaran pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada terminal-terminal bayangan dan sejumlah lahan atau tanah sengketa, tempat-tempat usaha hiburan, pusat keramaian dan tempat lain-lain yang dijaga oleh para preman termasuk lahan parkir, persimpangan lampu merah serta pemberhentian kendaraan umum seperti halte dan terminal angkot/ bis yang dijadikan lahan praktek aksi premanisme....”

Kriteria ini dibatasi pada kondisi mulai dari ambang gangguan sampai potensi gangguan kamtibmas saja dan apabila meningkat menjadi gangguan nyata dan berdampak terhadap ketenangan dan rasa aman masyarakat, akan dilaksanakan Operasi Kepolisian Khusus.

c. Kegiatan Operasi Kepolisian.

Kegiatan Operasi Kepolisian ini dilakukan apabila terdapat suatu keadaan atau meningkatnya peristiwa kejahatan tertentu yang terjadi di wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat. Personil yang dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah personil dari Satuan Fungsi Polres Metro Jakarta Barat dan personil Polsek jajaran Jakarta Barat, dengan tetap mengedepankan Satuan Reskrim sedang personil Polda Metro Jaya berfungsi sebagai *back-up* apabila ternyata personil dari Polres Metro Jakarta Barat tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan operasi Kepolisian ini. Dalam mendukung kegiatan operasi Kepolisian ini, Polres Metro Jakarta Barat akan mengkoordinasikan dengan masyarakat dan lintas sektoral yang akan menindaklanjuti hasil dalam operasi ini.

Kegiatan menanggulangi dan memberantas aksi-aksi premanisme baik dalam bentuk operasi tertutup maupun terbuka dan operasi-operasi Kepolisian khusus lainnya, pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan situasi kondisi kamtibmas yang kondusif, dan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Unit Anti Premanisme melalui operasi tertutup dilakukan adalah dengan mempersiapkan data awal sebagai target operasi berdasarkan hasil evaluasi kondisi kerawanan daerah pada waktu-waktu atau jam-jam tertentu, diantaranya tentang modus operandi dan pelaku atau kelompok-kelompok pelaku premanisme, daerah atau tempat yang dijadikan objek sasaran para premanisme. Dengan data awal yang dimiliki dalam setiap kegiatan operasi maka pengerahan kemampuan

yang ada baik personil yang dilibatkan maupun peralatan, sarana atau faktor pendukung lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dengan tetap memperoleh hasil yang maksimal.

Sedang untuk kegiatan operasi terbuka dalam penanggulangan aksi-aksi premanisme dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya dilakukan dengan melibatkan Satuan fungsi Samapta, Lalu Lintas, Intelkam, Narkoba dan Unit Provoost dan dilakukan ditempat-tempat rawan kriminalitas atau dijalan-jalan pada jam-jam tertentu yang dekat dengan objek yang biasa dijadikan sasaran aksi-aksi premanisme. Dalam kegiatan operasi terbuka tersebut mempunyai dampak yang positif dalam hal mempersempit ruang gerak para pelaku premanisme.

d. **Sistem Pelaporan**

Prosedur dan sistem pelaporan dari kegiatan operasi yang bersifat rutin dengan sasaran penanggulangan dan pemberantasan aksi-aksi premanisme dilakukan Perwira Sat Reskrim yang ditunjuk sebagai KA Tim Ops dengan membuat laporan secara tertulis dilaporkan kepada Kabag Operasi Polres Metro Jakarta Barat melalui Kaur Bin Ops Sat Reskrim, untuk diteruskan ke Polda Metro Jaya.

Menurut Rusmiati, Kaur Binops Sat Reskrim Polrestro Jakbar:

“.....dalam kegiatan operasi khusus sistem pelaporan yang dilakukan adalah dengan menginventarisir data kegiatan dan hasil operasi oleh Bag Ops Polres Metro dan dilaporkan setiap hari selama operasi berlangsung dan laporan hasil operasi diteruskan ke Posko Ops yang ada di Biro Operasi Polda Metro Jaya, dengan mencantumkan pengungkapan Target Operasi (T.O), dan bilamana Target Operasi belum tercapai, maka Ka Tim Ops yangditunjuk harus dapat mempertanggung jawabkan alasannya.....”.

e. **Anggaran Kegiatan Operasi**

Anggaran untuk melakukan kegiatan operasi yang bersifat rutin

adalah dengan menggunakan anggaran taktis yang tersedia di Polres Metro Jakarta Barat, sedangkan untuk anggaran/dana melakukan kegiatan operasi ini didukung selain dari APBN melalui DIPA Polres Metro dan APBD Kotamadya Jakarta Barat.

Menurut Kamil Razak, Kapolrestro Jakbar, dikatakan:

“...Polres Metro Jakarta Barat dengan Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dalam mewujudkan kerjasama dengan masyarakat secara luas dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap Penanggulangan Aksi Premanisme, sehingga pelaksanaannya tidak hanya menangkap dan menghukum para preman sampai dengan menjalani vonis hukuman saja tapi hingga mencari solusi lain seperti memberikan pendidikan dan pelatihan kerja termasuk penyediaan lapangan pekerjaannya....”.

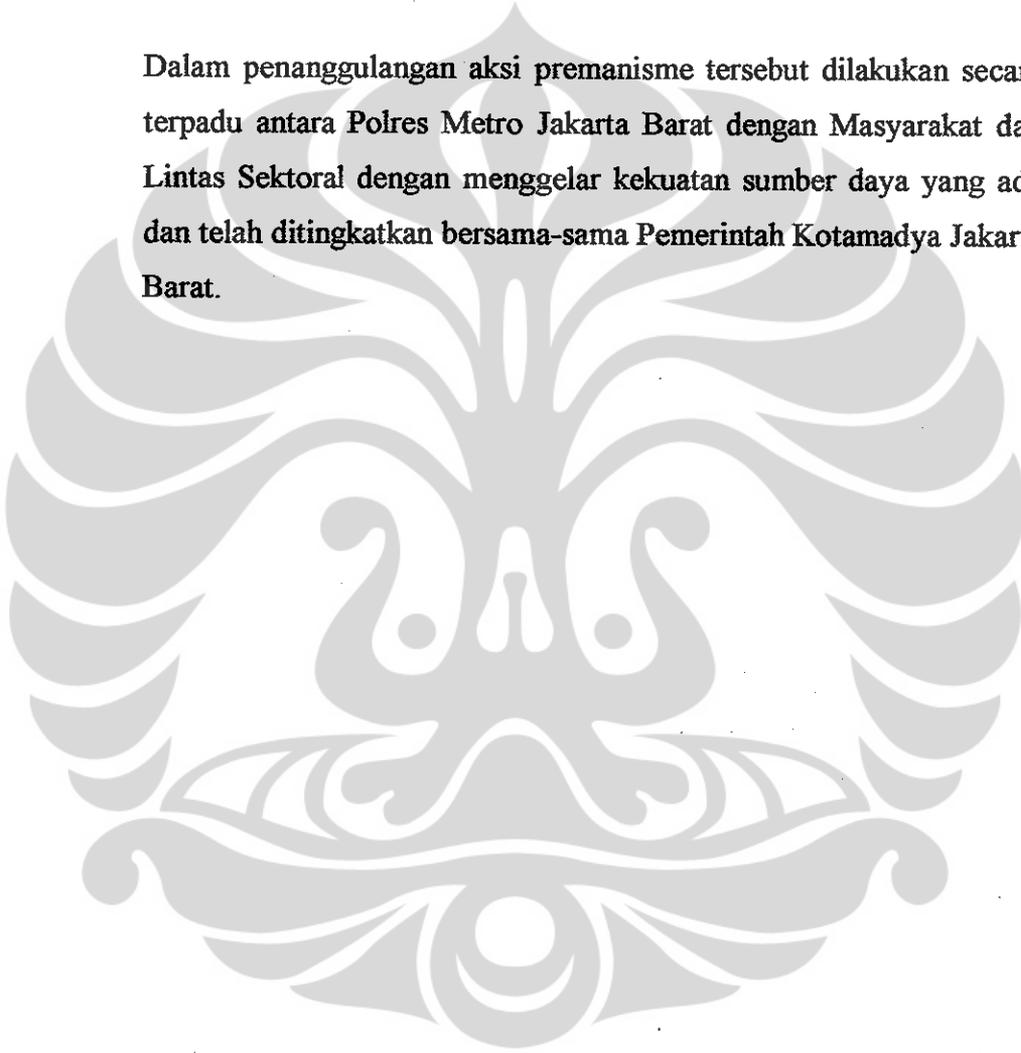
Hal ini dapat terlihat dari harapan-harapan yang akan diwujudkan dikemudian hari:

- 1) Polres Metro Jakarta Barat dan Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat harus membuat Nota Kesepahaman Bersama (MOU) tentang Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanapan Implementasi Pemolisian Masyarakat Tahun Anggaran 2010 dengan salah satu sasarnya adalah Penanggulangan Aksi Premanisme dan Pembentukan Unit Anti Premanisme Terpadu yang telah didahului oleh Polres Metro Jakarta Barat yang telah membentuk Unit Anti Premanisme.
- 2) Dukungan Anggaran terhadap Unit Anti Premanisme harus dialokasikan khusus dari APBD Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dan APBN DIPA Polres Metro Jakarta Barat dalam kurun waktu jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang.

Kamil Razak, Kapolrestro Jakbar, lebih lanjut mengatakan:

“.....maraknya aksi premanisme di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, menuntut adanya kesiapan dan peningkatan Sumber Daya Manusia serta peralatan dan perlengkapan yang memadai guna mengatasi dan mengantisipasi setiap permasalahan yang terjadi sesuai dengan tugas pokoknya sebagai penanggung jawab Kamtibmas dan Penanggulangan Aksi Premanisme tersebut yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas....”

Dalam penanggulangan aksi premanisme tersebut dilakukan secara terpadu antara Polres Metro Jakarta Barat dengan Masyarakat dan Lintas Sektoral dengan menggelar kekuatan sumber daya yang ada dan telah ditingkatkan bersama-sama Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat.



BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Keberadaan lembaga Kepolisian sebagai bagian dari *criminal justice system* memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya mewujudkan tujuan hukum yaitu ketertiban. Wilayah Indonesia yang sedemikian luas dan besarnya dengan kontur geografi yang cukup beragam serta faktor demografi yang sangat besar dan memiliki keunikan tersendiri baik dari adat istiadat, bahasa dan struktur sosial. Hal ini tentu saja menimbulkan tantangan tersendiri khususnya bagi lembaga kepolisian dalam kaitannya dengan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja dari Kepolisian itu sendiri.

Perubahan dan perkembangan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir juga terjadi dalam ruang lingkup ketatanegaraan dimana berubahnya konsep pemerintahan yang awalnya terpusat tetapi sejak dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga berimplikasi terhadap keberadaan dari Lembaga Kepolisian khususnya terkait juga dengan masalah mata anggaran untuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Perubahan dan perkembangan juga terjadi dalam hal kejahatan yang berkembang saat ini lebih teroganisir dan telah banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kejahatan yang membutuhkan penanganan yang cukup serius adalah aksi premanisme, dimana pelaku seringkali berkeliaran dan menyebarluaskan daerah kekuasaannya termasuk penambahan jumlah anggota komplotannya dengan meningkatkan pengaruh-pengaruh negatif di tempat-tempat kekuasaannya serta kondisi masyarakat yang belum awas dan mengerti tentang ancaman tersebut. Oleh karena itu dalam mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan yang memiliki modus operandi seperti itu, tentu saja dibutuhkan peranan masyarakat dalam menjaga dan mencegah kejahatan aksi premanisme tersebut terjadi dan berkembang di lingkungan masyarakatnya.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam era reformasi dan pembangunan saat ini memerlukan penyesuaian dan perubahan aspek struktural, instrumental dan kultural dengan paradigma baru reformasi serta tantangan tugas masa depan. Hal tersebut sesuai dengan dinamika pembangunan, perekonomian dan perubahan sosial yang terjadi secara alami pada masyarakat. Polres Metro Jakarta Barat dalam penanggulangan aksi premanisme harus mampu mengantisipasi faktor-faktor yang mempengaruhi secara internal dimana kelemahan yang ada diubah menjadi kekuatan dan pengaruh eksternal seperti pemanfaatan peluang yang ada serta meminimalisir kendala yang muncul dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif melalui pemberdayaan kerjasama dengan masyarakat termasuk kerjasama dengan lintas sektoral sehingga perkembangan perekonomian yang terjadi di masyarakat dapat diantisipasi oleh Polri untuk mewujudkan pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kotamadya Jakarta Barat dengan memanfaatkan teknologi dan informasi bersama-sama *stakeholder* sehingga keresahan di tengah-tengah masyarakat terhadap aksi premanisme dapat dihilangkan.

Hal ini dapat terwujud apabila sinergitas penanganan aksi premanisme yang dilaksanakan Polres Metro Jakarta Barat khususnya yang dilaksanakan oleh Satuan Fungsi Reskrim selama ini harus melibatkan satuan fungsi operasional Kepolisian lainnya seperti Satuan Intelkam, Samapta, Lalu lintas dan Bagian Binamitra termasuk meningkatkan koordinasi dengan Masyarakat dan lintas sektoral (Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum Lainnya). Oleh karena itu dalam menghadapi berbagai kondisi dan keadaan yang ada saat ini, kondisi yang diharapkan dalam rangka mewujudkan suatu polisi yang profesional dalam rangka mendukung tugas operasional kepolisian dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif adalah dengan membangun suatu konsep polisi masyarakat yang dalam hal ini adalah meningkatkan dan mendukung peranan serta terbentuknya kerjasama Polri dengan masyarakatnya.

1. Sumber Daya Kotamadya Jakarta Barat.

Kotamadya Jakarta Barat dengan luas kurang lebih 12.781.97 Hektar terbagi dalam 8 wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk 1.847.205 dimana laju pertumbuhan penduduk 0,4 % dalam 3 tahun terakhir seharusnya dapat diantisipasi dan dimanfaatkan oleh Polres Metro Jakarta Barat menggugah masyarakatnya yang jumlahnya hampir 2 juta jiwa tersebut ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung penanggulangan aksi premanisme dengan menyampaikan setiap informasi sekecil apapun yang terjadi di lingkungannya kepada Pihak Kepolisian serta melaksanakan kerjasama lintas sektoral dengan melibatkan para aparat Pemerintahan Daerah mulai dari Walikota dan Lurah sampai dengan Lurah di tingkat Kelurahan.

Kotamadya Jakarta Barat sebagai bagian Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Pusat Kegiatan Ekonomi, Politik, Sosial Budaya dan Hankam sekaligus merupakan bagian dari Jalur Sumatera menuju Jalur Pantura dan Bali, serta berfungsi sebagai pintu gerbang Internasional dengan berbagai kerawanan, baik yang berskala Nasional maupun Internasional secara otomatis pembangunannya juga menjadi perhatian Pemerintah Pusat selain Pemerintah Kotamadya di mana Polri harus bisa melihat peluang tersebut untuk pemanfaatan pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan kamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dengan terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat serta penegakan hukum dengan memanfaatkan sumber daya dan anggaran, maka pelaksanaan Pembangunan Kekuatan, Pembinaan Kekuatan dan Operasional Kepolisian harus dilaksanakan secara terpadu serta meningkatkan kerjasama lintas sektoral termasuk pelibatan masyarakat dengan memperhitungkan skala prioritas pelaksanaan tugasnya sehingga keresahan di tengah-tengah masyarakat khususnya maraknya aksi premanisme dapat dihilangkan secara berkesinambungan sehingga masyarakat bisa nyaman dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

2. Kemampuan Sumber Daya Polri.

Sumber daya Polres Metro Jakarta Barat membawahi 8 (delapan) buah Polisi Sektor (Polsek), yaitu: (1) Polsek Metro Cengkareng; (2) Polsek Metro Kalideres; (3) Polsek Metro Palmerah; (4) Polsek Metro Tanjung Duren; (5) Polsek Metro Tambora; (6) Polsek Metro Tamansari; (7) Polsek Metro Kebon Jeruk; dan (8) Polsek Metro Kembangan. Masing-masing Polsek berbatasan dengan Polres Metro lain seperti Polres Metro Jakarta Utara, Pusat dan Tangerang seharusnya dapat diberdayakan secara berkesinambungan dalam menanggulangi aksi premanisme sehingga keterbatasan jumlah sumber daya manusia bisa diantisipasi dengan melaksanakan koordinasi dengan Polres samping selain masyarakat dan instansi lintas sektoral.

Sedangkan jumlah personil Polres Metro Jakarta Barat masih kurang 804 personil Polri dan 77 personil PNS harus dipenuhi sesuai dengan DSP yaitu mencapai 2628 personil Polri dan 128 personil PNS sehingga perbandingan jumlah Polisi dengan Masyarakat 1 : 700 mendekati angka standar internasional *Police Ratio* 1 : 400. Dan yang terpenting adalah tidak terjadi penumpukan pada posisi jabatan dan kepangkatan tertentu khususnya pada posisi perwira sehingga perlu diadakan pola pembinaan personil dengan pola *tour of area* dan terpenuhinya 716 personil Brigadir Polisi serta untuk posisi Tamtama sudah alih Golongan kewenangan dan kemampuan ke Brigadir Polisi semua sehingga setaraf dengan masyarakat dalam kewenangan melakukan penyelidikan dengan tetap melaksanakan program pelatihan peningkatan kemampuan personil Polri sehingga dalam melayani masyarakat dapat dilaksanakan secara profesional, bermoral dan modern.

Kemampuan sumber daya Polri adalah suatu kemampuan yang diharapkan dalam rangka menanggulangi aksi premanisme yang cenderung marak di Tahun 2010 ini, sehingga kemampuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Personil Polri dalam menjalankan tugasnya diharapkan memiliki kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi merupakan kemampuan utama yang perlu dimiliki petugas Personil Polri, komunikasi harus diciptakan dengan cara dua arah dan langsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama bagi petugas Personil Polri untuk berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang disapa, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar masyarakat sehingga tidak menimbulkan antipati terhadap Polri.
- b. Personil Polri dalam menjalankan tugasnya diharapkan juga memiliki kemampuan deteksi dini. Kemampuan melakukan deteksi dini dengan mencari dan mengumpulkan bahan keterangan (informasi) dengan memperhatikan panduan teknis. Memberikan laporan informasi kepada kesatuannya untuk peringatan dini mengenai bahan keterangan yang diperoleh dan kisaran suara yang sedang berkembang dalam masyarakat.
- c. Kemampuan negosiasi juga merupakan kondisi yang diharapkan dari Personil Polri. Dalam bertindak sebagai fasilitator untuk menyelesaikan masalah aksi premanisme, Personil Polri harus memiliki kemampuan negosiasi untuk memudahkan penyelesaian dengan melakukan hal sebagai berikut : Melakukan pendekatan dan mengajak pihak-pihak yang terlibat pertikaian antar preman untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkhis. Melakukan pendekatan yang baik terhadap pelaku dan korban dari aksi premanisme untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tidak saling memusuhi. Senantiasa menerima pendapat dan saran dari pihak yang dilibatkan seperti tokoh-tokoh masyarakat, pihak terkait, aparat pemerintah dan instansi terkait. keberhasilan negosiasi sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku negosiator dalam memperlakukan orang lain khususnya pihak yang bertikai sehingga yang

tumbuh adalah saling harga menghargai dan kesadaran hukum yang tinggi dikarenakan sikap simpatik yang dilakukan personil Polri tersebut.

- d. Setiap Pimpinan di jajaran Polres Metro Jakarta Barat harus terampil dalam membaca situasi dan kondisi keterbatasan sumber daya Polri yang ada seperti mengubah kelemahan dan kendala menjadi kekuatan dan peluang dengan melakukan koordinasi baik secara internal di tubuh Polri maupun eksternal bersama-sama masyarakat dan instansi lintas sektoral.
- 3. Kerjasama Polres Metro Jakarta Barat Dengan Masyarakat Dalam Penanggulangan Aksi Premanisme.**

Sebagai salah satu wilayah yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi terutama aksi kriminalitas yang dilakukan oleh para preman, maka Polres Metro Jakarta Barat melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam menghadapinya. Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan terkait dengan aksi premanisme tersebut adalah dengan membentuk Unit Anti Premanisme Terpadu dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif dengan mengantisipasi Ambang Gangguan (FKK), Potensi Gangguan (PH) dan Gangguan Nyata (AF).

Dengan adanya Unit Anti Premanisme Terpadu tersebut diharapkan bahwa aksi kriminalitas yang dilakukan oleh para preman dapat menurun baik secara kualitas maupun kuantitas. secara teknis, penanggulangan aksi premanisme yang dilakukan oleh Unit Anti Premanisme Terpadu Polres Metro Jakarta Barat dengan mengedepankan Pola Kerjasama dengan masyarakat, dimana masyarakat yang pada hakekatnya adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur, baik masyarakat pengusaha, masyarakat pengunjung, masyarakat pemukiman, masyarakat pekerja, masyarakat pengguna dan pemakai jasa termasuk aparat pemerintah mulai dari pelaksana pemerintahan yang terkecil yaitu Kelurahan hingga Kotamadya selain kerjasama dengan para penegak hukum lainnya.

Terbentuknya premanisme di Jakarta Barat ini menurut *Thorsten Sellin* dalam teori *conduct-norm* adalah komunitas yang memunculkan keinginan untuk saling memperluas kepentingan yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut *Thorsten Sellin*, hal ini sesuai dengan premis "*When, as may be the case with legal norma, the law of one cultural group is extended to cover the territory of another*" (ketika kasus itu terjadi peraturan legal dalam salah satu kelompok budaya ingin memperluas kekuasaan). Artinya, dalam menegakkan eksistensi kewilayahannya dimana peraturan legal (undang-undang) tidak mengijinkannya karena melanggar hukum demikian pula dengan norma umum (aturan non penal/ tanpa sanksi nyata) tidak dapat menerima keberadaannya. Kondisi ini memaksa kelompok untuk tetap beraktifitas guna memenuhi kebutuhan kelompok atau individu dalam aspek fisik.

Premis ini sesuai yang diutarakan oleh sumber informasi Kamil Razak yang disebabkan oleh tingginya tingkat kompetisi berimplikasi terhadap perluasan daerah operasi kelompok preman. Kompetisi yang semakin ketat ini dikarenakan oleh adanya penindakan terhadap pelaku kegiatan premanisme oleh Polri sebagai dampak sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Sedangkan menurut Konsep *Lower Class Culture* dari *Walter Miller*, perilaku yang ditunjukkan oleh kelompok preman ini merupakan pengejawantahan beberapa premisnya, yaitu (1) *Trouble* atau dengan melakukan suatu perbuatan pidana seperti pemalakan dan pencurian, hal ini terbukti dari Laporan Polisi (LP) yang diterima oleh Polisi di Jajaran Polres Metro Jakarta Barat. premis ini terpenuhi karena benar nyata dilakukan oleh kelompok preman tertentu yang ada di masyarakat di wilayah Jakarta Barat; (2) *Toughness* atau ketangguhan atau keberanian dilakukan dengan tindakan yang tidak pernah merasa kapok atau jera, hal ini dibuktikan dengan preman yang ditangkap masyarakat dan diserahkan ke Polisi adalah mereka yang telah sering melakukan tindak pidana bahkan pernah ditahan (residivis) sebagaimana diungkapkan oleh sumber informasi Agung Wibowo dan Ardian; (3) *Excitement*

terwujud melalui kegiatan kelompok ini merupakan mata pencaharian, karena mereka tidak memiliki keahlian khusus atau berlatar pendidikan formal rendah. Hal ini terlihat dari kelompok penagih hutang (*debt collector*) yang mengandalkan bentuk fisik yang besar dan gagah dengan tampang yang menakutkan. Disamping itu, hasil yang lumayan dibanding usaha yang dikeluarkan menjadikan mereka malas untuk bekerja di sektor informal karena harus berkompetisi dan hasilnya kurang memuaskan.

Kondisi ini pada akhirnya berdampak kepada kecemasan masyarakat. Langkah yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat adalah menciptakan rasa aman masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah penegakan hukum dalam mewujudkan kondisi kamtibmas yang kondusif dengan membentuk Unit Anti Premanisme.

Pembentukan Unit Anti Premanisme Terpadu tersebut diatas harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergis satu sama lain dalam kurun waktu yang ditentukan dengan menentukan skala prioritas waktu dan sasaran dengan mengacu pada Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Barat, yaitu:

a. Kegiatan Rutin Kepolisian

Kegiatan Rutin Kepolisian merupakan kegiatan rutinitas penanggulangan aksi premanisme yang dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kondisi kerawanan di wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Dalam mendukung kegiatan operasi ini, Unit Anti Premanisme Terpadu Polres Metro Jakarta Barat sudah mempunyai daftar target dan sasaran yang akan dijadikan sasaran kegiatan rutin tersebut. Umumnya target dan sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah pada terminal-terminal bayangan dan sejumlah lahan tanah/tempat usaha hiburan, toko elektronik dan lain-lain yang dijaga oleh para preman termasuk lahan parkir, persimpangan lampu merah serta pemberhentian kendaraan umum seperti halte dan terminal angkot/bis yang dijadikan lahan praktek aksi premanisme dalam batasan kondisi mulai dari ambang gangguan sampai potensi gangguan kamtibmas

saja dan apabila meningkat menjadi gangguan nyata akan dilaksanakan Operasi Kepolisian.

b. Kegiatan Operasi Kepolisian

Kegiatan Operasi Kepolisian ini apabila terdapat suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi di wilayah Kotamadya Jakarta Barat sehingga akibat dari kejadian tersebut masyarakat menjadi resah dan merasa tidak aman. Para personil yang melaksanakan kegiatan ini adalah personil dari Polres Metro Jakarta Barat sebagai penjuror penanggulangan aksi premanisme, sedangkan personil yang ada di Polres tetangga dan Polda Metro Jakarta Raya berfungsi sebagai *back-up* atau cadangan apabila ternyata jumlah personil dari Polres Metro Jakarta Barat tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan operasi Kepolisian ini. Dalam mendukung kegiatan operasi Kepolisian ini, Polres Metro Jakarta Barat akan mengkoordinasikan dengan masyarakat dan lintas sektoral yang akan menindaklanjuti hasil dalam operasi ini.

Pelaksanaan kegiatan rutin dan operasi Kepolisian pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni menanggulangi aksi premanisme yang terjadi di wilayah Kotamadya Jakarta Barat, yang membedakan dari kegiatan tersebut agar mencapai hasil maksimal adalah:

1) Waktu Pelaksanaan/Jadwal

Waktu pelaksanaan Kegiatan Rutin Kepolisian adalah dengan memperhatikan kondisi kerawanan wilayah secara terus menerus dan apabila belum mencapai hasil yang sesuai harapan akan ditingkatkan menjadi Kegiatan Operasi Kepolisian yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 dan dapat dilaksanakan secara Mandiri Kewilayahan berkoordinasi dengan Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat.

2) **Target Operasi**

Target hasil kegiatan rutin biasanya adalah tempat-tempat rawan aksi premanisme seperti terminal-terminal bayangan dan tempat/lahan usaha yang dijaga oleh para preman, sedangkan kegiatan operasi yang menjadi target operasinya selalu berpindah-pindah tergantung dari tempat atau wilayah yang ditentukan oleh Unit Anti Premanisme Terpadu yang dianggap daerah yang rawan dan perlu dilakukan kegiatan operasi.

3) **Jumlah Personel**

Jumlah personil dari kegiatan rutin adalah dari Unit Anti Premanisme Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, ditambah dengan beberapa personil yang direkrut langsung dari unit-unit yang ada dibawah Satuan Fungsi-fungsi Polres Metro Jakarta Barat. Sedangkan kegiatan operasi jumlah personil yang diturunkan untuk melakukan kegiatan operasi ini adalah ditambah dari Polres samping dan personil dari Polda Metropolitan Jakarta Raya. Personil dari Polres Metro Jakarta Barat dalam kegiatan operasi ini dilaksanakan secara Mandiri Kewilayahan yang disepakati dengan Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat termasuk dukungan anggaran dari APBD.

4) **Sistem Pelaporan**

Prosedur dan sistem pelaporan dari kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Unit Anti Premanisme kepada Posko yang berada di Bagian Operasi untuk diolah dan dianev sebagai bahan pertimbangan untuk diambil keputusan lebih lanjut oleh Kapolres Metro Jakarta Barat sehingga dapat ditentukan untuk ditingkatkan atau tidak menjadi kegiatan operasi Kepolisian dengan sistem pelaporan yang dilakukan adalah dari Polres dan Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dan diteruskan pelaporan kegiatan operasi tersebut ke Polda Metropolitan Jakarta Raya.

5) **Anggaran Kegiatan Operasi**

Anggaran untuk melakukan kegiatan rutin adalah anggaran/dana

operasional yang tersedia di Polres Metro Jakarta Barat, sedangkan untuk anggaran/dana melakukan kegiatan operasi ini didukung selain dari APBN melalui DIPA Polres Metro dan APBD Kotamadya Jakarta Barat.

Polres Metro Jakarta Barat dengan Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dalam mewujudkan kerjasama dengan masyarakat secara luas dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap Penanggulangan Aksi Premanisme, sehingga pelaksanaannya tidak hanya menangkap dan menghukum para preman sampai dengan menjalani vonis hukuman saja tapi hingga mencari solusi lain seperti memberikan pendidikan dan pelatihan kerja termasuk penyediaan lapangan pekerjaannya. Hal ini dapat terlihat dari harapan-harapan yang akan diwujudkan dikemudian hari:

- a. Polres Metro Jakarta Barat dan Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat harus membuat Nota Kesepahaman Bersama (MOU) tentang Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemantapan Implementasi Pemolisian Masyarakat Tahun Anggaran 2010 dengan salah satu sarannya adalah Penanggulangan Aksi Premanisme dan Pembentukan Unit Anti Premanisme Terpadu yang telah didahului oleh Polres Metro Jakarta Barat yang telah membentuk Unit Anti Premanisme.
- b. Dukungan Anggaran terhadap Unit Anti Premanisme harus dialokasikan khusus dari APBD Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dan APBN DIPA Polres Metro Jakarta Barat dalam kurun waktu jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang.

Maraknya aksi premanisme di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, menuntut adanya kesiapan dan peningkatan Sumber Daya Manusia serta peralatan dan perlengkapan yang memadai guna mengatasi dan mengantisipasi setiap permasalahan yang terjadi sesuai dengan tugas pokoknya sebagai penanggung jawab Kamtibmas dan Penanggulangan Aksi Premanisme tersebut yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam penanggulangan aksi premanisme tersebut dilakukan secara terpadu antara Polres Metro Jakarta Barat dengan Masyarakat dan Lintas Sektoral dengan menggelar kekuatan sumber daya yang ada dan telah ditingkatkan bersama-sama Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat.

4. Kerjasama Polri Dengan Masyarakat Dalam Penanggulangan Aksi Premanisme.

Salah satu upaya Polres Metro Jakarta Barat bersama Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat untuk lebih memberdayakan masyarakat adalah dengan melaksanakan kerjasama untuk penanggulangan aksi premanisme dalam rangka membina kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Hal tersebut di atas sejalan dengan rencana pokok dari program Polri meliputi peningkatan penyelenggaraan fungsi-fungsi operasional dalam aspek tugas deteksi, preemtif, preventif dan represif guna terpeliharanya Kamtibmas dan tegaknya hukum, dengan pengutamaan tugas-tugas preemtif, dan preventif khususnya dalam rangka menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas dan pengenalan konsep *community policing*.

Community policing adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Juga sebagai filosofi pemolisian dan program strategi. Sehingga *community policing* dapat didefinisikan sebagai cara/gaya pemolisian dimana polisi bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/menjaga keamanan di lingkungannya.¹

¹ Satjipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi*, makalah Seminar Nasional tentang Polisi dan Masyarakat di Era Reformasi

Peningkatan pelaksanaan tugas fungsi-fungsi pembinaan dalam rangka kesiapan dukungan bagi penyelenggaraan tugas fungsi-fungsi operasional, dengan prioritas kepada upaya peningkatan ketersediaan sumber daya, berupa sarana dan prasarana mobilitas serta komunikasi.

1. Visi

Dalam upaya mewujudkan kamtibmas yang kondusif dapat dirumuskan bahwa visi yang diemban oleh Polres Metro Jakarta Barat sejalan dengan visi dari Polri yaitu “Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.”

2. Misi

Dalam menjalankan visi Polri khususnya dalam upaya mewujudkan pertahanan dan ketahanan masyarakat dibutuhkan misi yang nyata sehingga visi tersebut dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Oleh karena itu misi yang dapat disimpulkan sebagai sarana sehingga visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat melalui bimbingan, pengayoman, perlindungan, penyelamatan, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat.
- b. Mengembangkan Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- d. Menegakkan hukum secara independen, tidak diskriminasi, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

- e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup.
- f. Meningkatkan nilai moral dan agama dalam sikap dan perilaku kehidupan.
- g. Mendukung upaya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dalam mensukseskan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Tujuan

- a. Bersama-sama instansi lintas sektoral membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat di Kotamadya Jakarta Barat.
- b. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, kesadaran tentang kamtibmas dan partisipasi masyarakat dalam pembinaan kamtibmas di Kotamadya Jakarta Barat.
- c. Pelindung dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa tentram di masyarakat.
- d. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan karakteristik masyarakat perkotaan dalam kamtibmas.
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam kamtibmas.

4. Sasaran

Untuk menjalankan strategi tersebut, dibutuhkan suatu sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan dari upaya kerjasama Polri dengan Masyarakat adalah:

- a. Terwujudnya suatu perencanaan dan penataan bentuk kerjasama yang baik sehingga semua pihak yang terlibat dapat mengetahui fungsi dan peranannya dalam penanggulangan aksi premanisme dan terjalin hubungan yang harmonis antar pihak yang terlibat.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Polri khususnya Unit Anti Premanisme yang berdasarkan pada kompetensi, sehingga dapat terwujud SDM Polri yang mahir, terpuji dan patuh hukum, serta memiliki integritas.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana Polri khususnya Unit Anti Premanisme baik untuk kebutuhan individu maupun organisasi, termasuk meningkatnya kesejahteraan anggota Polri dan keluarganya.
- d. Terdapat suatu hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat melalui program *community policing*. Terwujudnya personel Polri sebagai polisi sipil sehingga personel Polri dapat menempatkan dirinya secara proporsional, atau dengan kata lain dapat memposisikan dirinya pada saat bertindak selaku "*a strong hand of society*" atau "*a soft hand of society*".
- e. Terwujudnya mekanisme model pembiayaan yang dapat mengakomodasi segala kebutuhan Unit Anti Premanisme dan bersifat berkelanjutan.

5. Kebijakan

Sasaran tersebut dicapai dengan arah kebijakan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penataan Unit Anti Premanisme yang baik antara Polri (Polres Metro Jakarta Barat), Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dan Masyarakat.
- b. Sistem penilaian kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Polri khususnya Unit Anti Premanisme yang berdasarkan pada kompetensi.
- c. Pembangunan sarana dan prasana disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing wilayah kerja Unit Anti Premanisme.
- d. Meningkatkan profesionalisme dalam bentuk kerjasama melalui pembinaan kinerja Unit Anti Premanisme dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku serta pementapan struktur organisasi Kepolisian.
- e. Menyusun kebijakan keuangan dan sumber pembiayaan yang seimbang dengan mengoptimalkan peranan pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dan masyarakat.

6. Strategi

Peran polisi yang memiliki tugas untuk melindungi dan melayani masyarakat, pada dasarnya mengemban tugas yang membingungkan. Masyarakat modern saat ini memiliki susunan yang sangat heterogen. Masyarakat terdiri dari berbagai macam golongan dengan status dan kepentingan masing-masing.

Perpolisian menempatkan polisi pada situasi moral yang problematik. Pekerjaan Polisi yang harus menjaga keamanan, ketertiban, mengemukakan kejahatan, menghadapkan polisi kepada permasalahan moral khususnya dalam menghadapi Aksi Premanisme.

Oleh karena itu untuk mencapai peningkatan peranan Polisi Desa dalam mewujudkan kamtibmas yang kondusif maka strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. Melakukan penataan Kerjasama terkait dengan peranannya dalam penanggulangan aksi premanisme serta hubungannya dengan masing-masing pihak yang terlibat. Termasuk menata pola hubungan antara pihak yang berisikan pembagian tugas, pola kerja dan hubungan koordinasi.
- b. Mengembangkan dan merevitalisasi sumber daya manusia yang terlibat dalam Unit Anti Premanisme.
- c. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung dan mensukseskan upaya Penanggulangan Aksi Premanisme.
- d. Mengembangkan dan menyusun fungsi dan aktivitas yang dapat dilakukan oleh Unit Anti Premanisme.
- e. Menyusun dan mencari model pembiayaan yang digunakan untuk mendukung terlaksananya Upaya Penanggulangan Aksi Premanisme.

7. Upaya Implementasi Kerjasama antara Polri dengan Masyarakat

Untuk mewujudkan terbangunnya Kerjasama dalam rangka mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat, upaya yang dilakukan adalah:

- a. Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Anti Premanisme:
 - 1) MOU yang disepakati harus dijalankan oleh semua pihak, baik pengambil kebijakan dalam hal ini Polres Metro Jakarta Barat dan Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat sampai dengan pelaksana dilapangan yang dalam hal ini Unit Anti Premanisme itu sendiri.

- 2) Memberikan masukan kepada Pemerintah Kotamadya dalam hal ini Walikotamadya dan DPRD khususnya dalam menyusun mata anggaran terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan operasional dari Unit Anti Premanisme.
 - 3) Menyusun program-program riil yang mudah dilaksanakan, penyusunan job description yang lebih jelas kemudian HTCK yang mudah diimplementasikan sehingga dapat menjawab siapa berbuat apa, dengan siapa bekerjasama serta kepada siapa bertanggung jawab.
- b. Penyempurnaan penata pelaksanaan Unit Anti Premanisme yang berkaitan dengan Tupoksi masing-masing namun tugas dan pola kerjanya serta koordinasi yang jelas dengan pihak-pihak terkait yang dapat digambarkan sebagai berikut :
- 1) Penataan Unit Anti Premanisme
 - a) Unsur Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat diwakili oleh Bagian Keselamatan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat. (Kabag Kesbang Linmas) termasuk Kepala Dinas terkait.
 - b) Unsur Polres Metro Jakarta Barat diwakili oleh Bagian Operasional (Kabag Ops).
 - c) Criminal Justice System (Aparat Penegak Hukum lainnya).
 - d) Ditambah unsur-unsur masyarakat diantaranya : tomas, toga dan toda.
 - e) Lurah sebagai pengawas.
 - 2) Pola Hubungan antara aktor/ pihak

- a) Kapolres Metropolitan Jakarta Barat bertindak sebagai pengawas langsung dilapangan.
- b) Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Barat sebagai Koordinator Unit Anti Premanisme yang mengkoordinir para Kapolsek, para Kasat Fungsi dan seluruh anggota yang terlibat di Unit Anti Premanisme, sedangkan;
- c) Tomas, toga, majlis taklim serta toda merupakan unsur masyarakat yang berfungsi sebagai kemitraan dengan Polri.

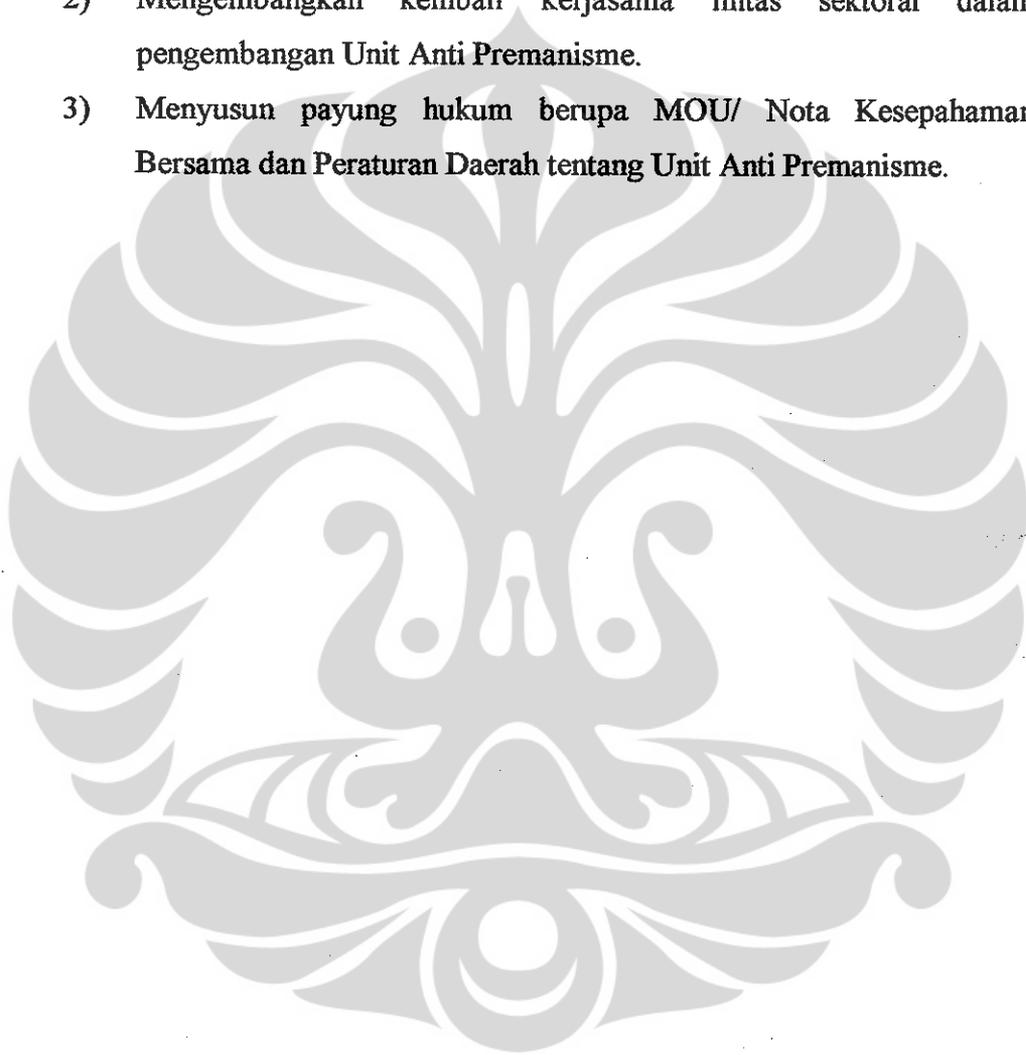
Dalam pelaksanaan kegiatan Unit Anti Premanisme ada pembagian tugas terhadap masing-masing unsur, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya (pola kerja dan hubungan koordinasi) setiap unsur pelaksana mengacu kepada *job description*. Karena disamping melaksanakan kegiatan yang tertera dalam job description masing-masing Satuan Fungsi dan Instansi Lintas Sektoral, setiap unsur pelaksana pada Unit Anti Premanisme mempunyai tanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi pada masing-masing kesatuan/instansi dimana setiap unsur bernaung.

3) Job description Unit Anti Premanisme

- a) Sebagai juru penerang dan penyuluh di bidang hukum dan kamtibmas terkait Aksi Premanisme.
- b) Pelayanan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan kamtibmas dalam masyarakat khususnya Aksi Premanisme.
- c) Pelindung masyarakat dari ancaman/gangguan kamtibmas terhadap kepentingan-kepentingannya.
- d) Penertiban hukum dan norma-norma masyarakat yang berkaitan dengan aspek kamtibmas.

- e) Penggerak rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka kerukunan bersama.
 - f) Pendukung media komunikasi dan informasi dalam membina kehidupan masyarakat terkait kasus aksi premanisme.
 - g) Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara masyarakat dan aparat pemerintah dan Kepolisian.
 - h) Aktif dalam setiap Penanggulangan Aksi Premanisme.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Unit Anti Premanisme :
- 1) Mengadakan pelatihan kepada setiap personil yang terlibat dalam Unit.
 - 2) Mengadakan Rapat koordinasi dengan unsur Unit Anti Premanisme lainnya, tentang permasalahan yang dihadapi.
 - 3) Melaksanakan tutorial, latihan simulasi dan problem solving yang berorientasi pada permasalahan aksi premanisme.
 - 4) Melakukan supervisi dan monitoring terhadap kinerja Unit Anti Premanisme.
- d. Menyusun program untuk usulan pengadaan sarana dan prasarana yang mampu mendukung operasionalisasi Unit Anti Premanisme :
- 1) APBN Polri yang khusus ditujukan kepada personil yang terlibat Unit Anti Premanisme, dana anggaran yang terealisasikan dalam bentuk :
 - a) Sarana dan prasarana: kendaraan R2 sebanyak 2 (dua) unit dan R4 sebanyak 4 (empat) unit.
 - b) APBD Kotamadya Jakarta Barat

- c) Untuk pendanaan Unit Anti Premanisme Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat akan mengadakan usulan perubahan anggaran pada Tahun Anggaran 2010.
- e. Menyusun Sistem dan Metode
 - 1) Menyusun petunjuk teknis tentang Unit Anti Premanisme.
 - 2) Mengembangkan kembali kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan Unit Anti Premanisme.
 - 3) Menyusun payung hukum berupa MOU/ Nota Kesepahaman Bersama dan Peraturan Daerah tentang Unit Anti Premanisme.





BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Keberadaan Polres Metro Jakarta Barat saat ini dalam penanganan aksi premanisme telah berjalan cukup baik menurut kasus yang telah ditangani berjumlah 1.257 kasus namun masih banyak kekurangan khususnya dari segi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran serta sistem dan metode yang digunakan untuk mengoptimalisasi penanggulangan aksi premanisme. Berdasarkan hasil pemaparan dalam menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan penanggulangan aksi premanisme dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kerjasama antara Polri dengan Masyarakat sebagai terobosan untuk membuka sumbatan-sumbatan persepsi masyarakat yang berkaitan dengan implementasi penanggulangan aksi premanisme adalah upaya yang dikemas secara proporsional oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dengan Polres Metro Jakarta Barat yang akan diwujudkan dalam MOU/Nota Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemantapan Implementasi Kerjasama antara Polri dengan Masyarakat Tahun Anggaran 2010. Namun dalam implementasinya, dalam penanggulangan aksi premanisme masih dirasakan belum optimal sebagai akibat dari *Police Ratio* (perbandingan rasio Polisi dengan masyarakat belum mencapai) 1: 700, kuantitas personil dan kualitasnya serta dukungan sarana prasarana, anggaran serta mekanisme kerja masih dirasakan kurang. Hal ini terkait bahwa kekuatan riil personil baru tersedia 69,4% dari DSP sedangkan wilayah yang harus dipantau cukup luas, kurang lebih 12.781.97 Ha, secara administratif terbagi dalam 8 wilayah kecamatan yang didiami penduduk menurut registrasi kependudukan Tahun 2009 berjumlah 1.847.205 dengan kepadatan 15.127 jiwa/Ha dengan laju pertumbuhan penduduk 0,4 % dalam 3 tahun terakhir,

bahwa penanggulangan aksi premanisme sebagai upaya optimalisasi kerjasama antara Polri dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan kemampuannya.

- b. Optimalisasi Kerjasama antara Polri dengan masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik dari faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal berupa kekuatan adalah terdapat kebijakan yang mendukung terlaksananya Kerjasama antara Polri dengan masyarakat dimulai dari UUD 1945 sampai dengan MOU/Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dengan Polres Metro Jakarta Barat rencananya akan dilaksanakan di Tahun 2010 ini tentang Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemantapan Kerjasama antara Polri dengan Masyarakat Tahun 2008. Akan tetapi terdapat kelemahan khususnya tentang sumber daya manusia termasuk di dalamnya sarana dan prasana yang mampu mendukung dan menunjang terwujudnya Unit Anti Premanisme Terpadu. Sedangkan ditinjau dari faktor eksternal berupa peluang dan kendala, peluang disini adalah adanya dukungan pemerintah Kotamadya Jakarta Barat secara nyata, termasuk juga dukungan lembaga-lembaga instansi lintas sektoral terkait. Peluang ini juga ditambah dengan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swadaya masyarakat. Meskipun begitu kendala yang ada adalah masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya optimalisasi kerjasama ini sebagai sarana yang mampu membantu terwujudnya kamtibmas yang kondusif, serta masih kurangnya anggaran dalam memenuhi biaya operasional penanggulangan aksi premanisme.
- c. Harapan yang ingin di capai adalah kerjasama antara Polri dengan masyarakat mampu melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi operasional kepolisian yang berkaitan dengan operasionalisasi penanggulangan aksi premanisme dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan/gangguan

keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam lingkungan masyarakat setempat. Kerjasama ini diharapkan dapat melaksanakan fungsi bimbingan dan penyuluhan masyarakat dan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam penanggulangan aksi premanisme serta anggota yang terlibat dalam Unit anti premanisme dalam menjalankan tugasnya diharapkan memiliki Kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi merupakan kemampuan utama yang perlu dimiliki personil unit tersebut untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang bersumber dari masyarakat. Dukungan dari Pemerintah Kotamadya yang telah ada selama ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan dan ditingkatkan baik dari bentuk kerjasama maupun pembiayaan.

- d. Upaya penanggulangan aksi premanisme yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penataan kerjasama tersebut dengan peranannya sebagai perwujudan optimalisasi kerjasama antara Polri dengan masyarakat serta hubungannya dengan masing-masing pihak yang terlibat. Mengembangkan dan merevitalisasi sumber daya manusia yang terlibat dalam Unit Anti Premanisme. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung dan mensukseskan penanggulangan aksi premanisme. Mengembangkan dan menyusun fungsi dan aktivitas yang dapat dilakukan pada saat implementasi penanggulangan aksi premanisme serta menyusun dan mencari model pembiayaan yang digunakan untuk mendukung terlaksananya optimalisasi kerjasama antara Polri dan Masyarakat.

2. Rekomendasi

- a. Kerjasama yang telah dibangun antara Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat dan Polres Metro Jakarta Barat selama ini telah berjalan dengan baik lebih ditingkatkan, dimana bentuk kerjasama ini tidak bersifat temporary,

atau dengan kata lain *lips service* oleh karena itu diperlukan komitmen dan kebijakan yang berkesinambungan (*Sustainable*) oleh siapa saja yang menjabat sebagai pimpinan diwilayah tersebut.

- b. Menyiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi *Police Ratio* 1 : 700 dengan disertai pola rekrutmen yang memenuhi standar kualitas baik secara ilmu pengetahuan/*knowledge*, keterampilan/*skill* dan perilaku/*attitude* dengan kemampuan yang berorientasi kepada kearifan budaya lokal khusus budaya masyarakat perkotaan.
- c. Optimalisasi Kerjasama antara Polri dan Masyarakat sebagai program terobosan dalam mengimplementasikan penanggulangan aksi premanisme yang mengacu pada kearifan budaya lokal masyarakat perkotaan diperlukan payung hukum yang jelas dimana MOU yang akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Kerjasama pengelolaan Penanggulangan Aksi Premanisme yang sekaligus dilengkapi dengan dukungan alokasi anggaran operasional dan pembangunan sarana prasarana yang bersumber dari APBD untuk sektor pembiayaan dari Kesejahteraan Pembangunan Lintas Masyarakat (Kesbang Linmas) dan Kimpraswil Kotamadya Jakarta Barat.
- d. Unit Anti Premanisme yang telah dibentuk oleh Polres Metro Jakarta Barat selama ini anggota-anggotanya adalah merupakan perekrutan dari beberapa fungsi kepolisian yang lain yang ada di Polres Metro Jakarta Barat, seperti dari Sat Jatanras, Sat. Intel, Sat Resmob dan lain-lain. Agar dalam pelaksanaan kedepannya anggota-anggota yang direkrut menjadi Unit Anti Premanisme tersebut tidak terkesan tumpang tindih jabatan, maka disarankan kepada unsur pimpinan agar Unit Anti Premanisme yang telah dibentuk tersebut dapat berdiri sendiri dan langsung berada di bawah Kasat Reskrim. Dengan demikian anggota-anggota yang direkrutnya pun tidak memiliki dualisme jabatan, dan terfokus pada kegiatan dibidang penindakan premanisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Freddy Rangkuti, 2002. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
2. George R. Terry, 1986. *Principles of Management (Asas-Asas Manajemen)*, oleh Winardi.
3. Hano Johannsen and G Terry Page, *International Dictionary of Management*, London, Kogan Page.
4. Irjen Pol. Drs. Aryanto Sutadi, MH., MSc., Bahan Ajaran MP. Hubungan Polri dan Lintas Sektoral.
5. Jurnal Polisi Indonesia, Tahun V/April 2004, CV Adi Cipta Grafinda, Jakarta.
6. J.B. Subandono., Drs., (ec)., S.Psi., MM., MSi., Dr. (cand), Bahan Ajaran MP. Pembangunan Citra Polri.
7. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2002. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka.
8. Kartini Hartono, 1985, *Psikologi Sosial Untuk Manajemen, Perusahaan dan Industri*, PT Rajawali, Jakarta.
9. Kunarto, 1999. *Bunuh Preman, Rampok*, Jakarta: Cipta Manunggal.
10. Suparlan, Parsudi, 1999. *Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Hukum Nasional VII, Departemen Kehakiman.
11. Tabah, Anton, 2001, *Membangun POLRI yang kuat (Belajar dari Macam-macam Asia)*. Jakarta: Mitra Hardhasuna, Cetakan Pertama.
12. Ulung Koeshendratmoko, 2009, *Kontroversi Pemberantasan Premanisme..*
13. Wresniwiro, 2002, *Membangun Polisi Profesional*, Jakarta: Bina Dharma Pemuda.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, CV Eko Jaya, Jakarta, 2002.
2. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Rencana Kerja Kapolri T.A. 2007.
4. Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/37/X/2008 tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri dan Profesional

Surat Kabar/ Majalah:

Pikiran Rakyat, *Memberantas Preman atau Mencegah Marginalisasi?* Sabtu, 15 November 2008.

Surabaya Pagi Online, *Sewa Preman untuk Keamanan*, 10 November 2008

Internet:

<http://sambodopurnomo.wordpress.com/2009/06/04/premanisme-dan-problem-oriented-policing/>

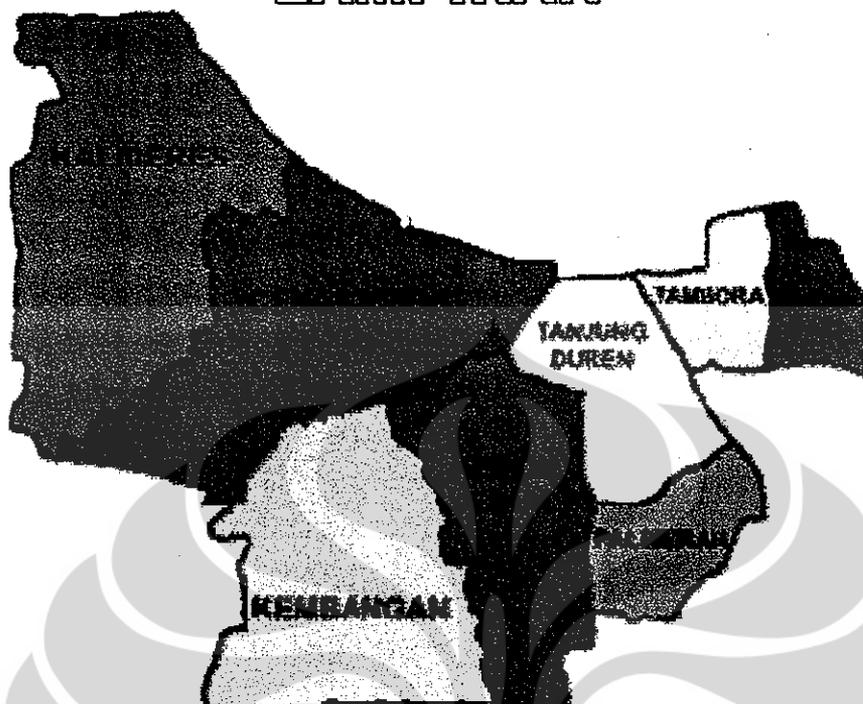
<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2008/11/18/39809>

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28279&Itemid=62

<http://headline-news/berita-media>, 29 Januari 2009.



LAMPIRAN



Peta Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat



Kamil Razak

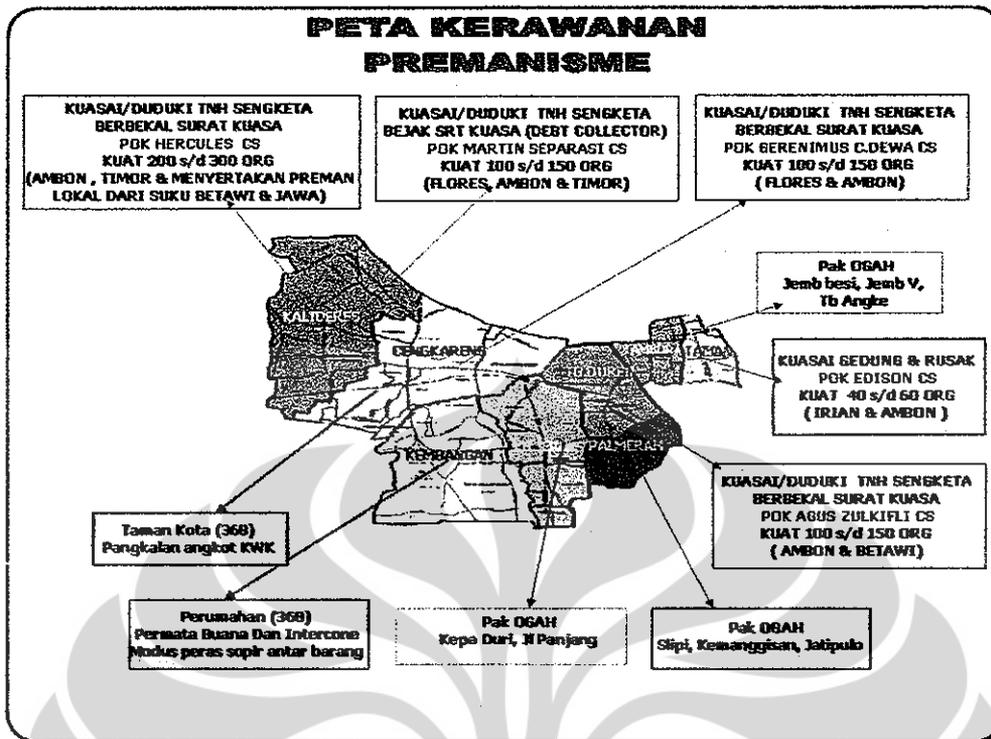


Pujiharto



Rusmiati

Beberapa Sumber Informasi Penelitian



Peta Kerawanan Daerah

**POK PREMAN
KUASAI TNH / BANGUNAN SENGKETA
DGN SURAT KUASA**

**POK HERCULES CS
MODUS MASUK SOR PASCA & DUDUKI TNH
TGL 2 NOV 2006 TWP KOMPLEK CITRA Y KALIDERES
BP LIPPAHPI & SIDANG (YORIS)**

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. HERCULES 2. Ir RUDDOLFUS 3. AMBA BENGU 4. MARTIN NEPARASI 5. EDI TURANGGA 6. ERUK HARTANTO | <ol style="list-style-type: none"> 1. EDISON 2. JHON ALPHES 3. JHON BAHADIN 4. PEDRO T.J 5. ABUL M IRANSISCO 6. AGUS S 7. SUBIARTO 8. JHON MARIUS 9. ALEXANDER | <ol style="list-style-type: none"> 1. GERADIS.HD 2. MODESTUS.T 3. OKTAVIANUS.S 4. STEVEN 5. ROSNOLJ 6. JAMES.O 7. MARTINOR 8. JAMES.ULI 9. SYARIF 10. AGUSTINUS/L | <ol style="list-style-type: none"> 1. ITO IMANUEL 2. JERINR 3. BAHRIJN 4. ADI 5. ROPINIS.R 6. YANITA 7. YACUB.D 8. RICHVALR 9. JANI 10. ARLO | <ol style="list-style-type: none"> 1. SYARFUDDIN 2. RUSMITA 3. IGWANTIS 4. FERMANSTAH 5. SAROKI 6. SUPRIYANTO 7. MOH RAMDANI 8. GUNAWAN 9. EDI MARNI 10. MALI | <ol style="list-style-type: none"> 1. SERIANUS 2. RISKALH 3. IREN JR 4. RAIMAT 5. ABD RAHMANN 6. MLLISMAN 7. HASAN B.T 8. EMANUEL.R 9. GANI W 10. AHMAD G.LONDI |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. HENDRI KILI 2. JAKARIAS 3. JAWABER 4. RIATNO 5. ANOK 6. SUHERMAN 7. AGUNGK 8. MELKI 9. EYMAN 10. IRWANSTAH | <ol style="list-style-type: none"> 1. HILARIUS 2. ROKLA 3. UMAR MALOW 4. M. WUSE 5. ROBERTUS.B 6. ABDU MUSTAR 7. PETRUS.L 8. TAMRIN 9. PASKALIS 10. SURYA. I | <ol style="list-style-type: none"> 1. HERMANUS 2. BENERDIKTUS 3. EDLL 4. PETRUS K 5. LOBIEKTUS 6. GERONIMUS 7. DIAS. A 8. VALENTINUS 9. M. RICHMAN 10. JHONI DOU | <ol style="list-style-type: none"> 1. RIDWANP 2. JOHANS.B 3. M. ROKHMANLI 4. TASHMALL 5. JOHANS.S 6. M.TAHER.B 7. YUSRALO 8. M. ANWAR 9. SUPMETS 10. JANUARITUS.M | <ol style="list-style-type: none"> 1. JELPIK 2. SALESTINU 3. GAERLH 4. AMRIZAL 5. ERRENJ 6. HAREJ 7. YUPLR 8. ANDI YATAN 9. A.RAHSTAN 10. ABD ROHM | <ol style="list-style-type: none"> 1. ANDREAS.T 2. YOSEP. S 3. SUPRIYANTO 4. MAXLP 5. ABDIN 6. NURHADI 7. ANUS 8. ABDILAH 9. MUSEERL 10. A. SANUSI |

Psl : 335 (1) dan 167 KUHP (PU)

Daftar Kelompok Preman Tanah/ Bangunan Sengketa

RUSAK DAN MASUK GEDUNG / KANTOR
 LP NO 1549/K/KI/2006/RES JB
 TKP RUKO KETAPANG INDAH BLOK D 2 NO 12
 KRUKUT TAMANSARI
 TGL 12 SEP 2006
 BERKAS LIMPAN PU & SIDANG

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. M. JAMIL 2. SUEB 3. LAODE 4. ARMAN 5. MOKOGINTA 6. LAMIUN 7. M.SALEHR 8. OTIS RETAUHIT 9. ARTHUR MAULANI | <ol style="list-style-type: none"> 1. AGUSTINUS.S 2. SUYONO 3. GUSMIN 4. BIBIT.S 5. RONI TANDEY 6. JEMI GEORGE.K 7. PARJONO 8. EFENDI 9. JUPRI KAPUTUNGAN 10. SISWANTO 11. ALEXANDER.S 12. GUSRAN 13. YOPI RAYAAN 14. YAMIN.M PILIA 15. BADRIANTO 16. ISKANDAR 17. DOMINGGUS.T 18. LABIMA 19. MAHIPAL 20. 20 ARDAN 21. A. RAZAK 22. W. MANUPUTI 23. LAODE MAO | <ol style="list-style-type: none"> 1. EDISON E 2. LAKAEKE 3. BAHARUDIN 4. ROBIN 5. SYARIF VAN GOBEL 6. LAODE SAFARUDIN 7. ASMAN 8. LUCAS DOMINGGUS 9. MATHES LERAPARI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Psj : 170, 335 (1)
351 KUHP
(PU)*

Daftar Kelompok Preman Masuk Gedung

POK PREMAN
 RUSAK PAGAR DAN KUASAI TNH SENGKETA
 PERTAMINA Gg SUMUR II CENGKARENG
 Lp 754/K/VI/2006/RES JB
 29 JUNI 2006 LIMPAN PU & PN

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. GERENIMUS. D 2. PASKALIS A 3. JUVENIUS.R 4. CHRISTIAN MANASE 5. ALEXANDER LUKAS 6. EMANUEL BEY 7. YULIUS MIREMA 8. JOHANNES E.B | <ol style="list-style-type: none"> 1. IGNATIUS AGO 2. GERENIMUS JERADO | <ol style="list-style-type: none"> 1. AGUSTINUS.W 2. BERNABAS NGAGI 3. JOHANNES TAY 4. JOHANNES KINGAI 5. SULTAN SALADIN 6. CHRISTANTO GALE 7. CARLOS DOMINGGO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Psj : 170, 335 (1), 351 dan 167 KUHP
(PU)*

Daftar Kelompok Preman Rusak Pagar



POK MARTIN NEPARASI Gs
KUASAI/DUDUKI RMH TAGIH HUTANGLP NO 408/K/II/2006/RES JB
23 FEBRUARI 2006
TKP TAMAN SEMANAN INDAH C 8/12 KALIDERES

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. MARTIN NEPARASI 2. JIMI OS 3. SIMSON Y 4. RUDI AMBAT 5. MAXI BARIA 6. JORIN RIWULJ 7. DENII LAY 8. PHILIPUD 9. DANIEL SANJ 10. SUGANDA | <ol style="list-style-type: none"> 1. JAMES DANIEL M 2. ANTON MUNI 3. ALFONSUS.D WOME 4. LEONARD TAIBIMA 5. ARNALUS WILANEND 6. ANOK YOHANES.J 7. IMANUEL SANDI 8. UJUD BABE 9. YULIUS NGAILU 10. MARTIN STEPEN | <ol style="list-style-type: none"> 1. STEVEN OTOMUSU 2. METUSALAM 3. SEM JITRO 4. LEONARD MENEPA 5. HAPELES KUNAI 6. CHARLES FREDI 7. ANDRIANUS 8. M. AMIN 9. DERTU LEOMULLS 10. BONEPATIUS. B |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ps1 : 335 (1) dan 167 KUMP
(PU)

Daftar Kelompok Preman Penagih Hutang



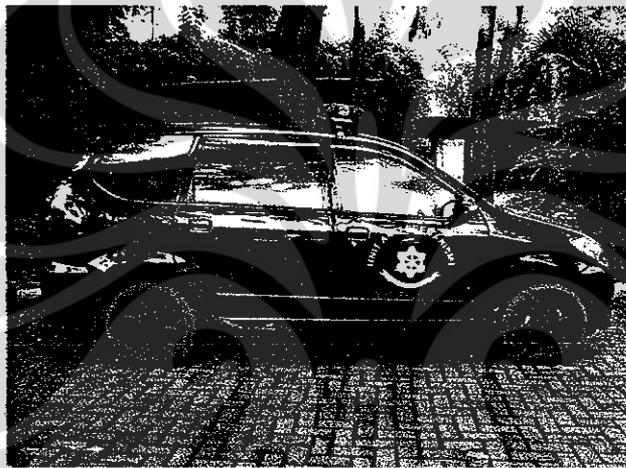
POK AMBON & POK BETAWI
KUASAI/DUDUKI TNH SENGKETA
LP NO 253/K/II/2006/RES JB
17 FEBRUARI 2007
TKP JL. S. PARMAN KAV 3 TJ DUREN

Ps1 : 170 KUMP
335 (1) KUMP
167 KUMP (Proses)

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. MUKTI MUDENI 2. MARHADI 3. MISNEN 4. MUSITO 5. AGUS 6. MUHARDIAN 7. M. SAHAN 8. HENDRIS 9. MUNAHASAN 10. KOTIB 11. AZIS 12. WAHYUDIN 13. ROPIK 14. SUPRIADI 15. BUDIANTO 16. SARIFIDIN 17. JENI 18. ALAMSYAH 19. MAHEI 20. NOPIANDI | <ol style="list-style-type: none"> 21. AGUS.S 22. AGUS TRIS 23. YADI 24. RUKMANTO 25. RUDIANTO 26. TABRONI 27. ANANG 28. SYAMSUL 29. TONI 30. ACHMAD 31. IRWAN 32. RUDI 33. NURDIN 34. JAYADI 35. MURSAN 36. SYAIFUL 37. GUNADI | <ol style="list-style-type: none"> 1. AGUS SETYABUDI 2. ABD LATIF 3. ONGEN 4. TALFIK 5. NASIER 6. MASAD 7. MUSRI 8. ALDI DEWA 9. RIVAL 10. SYAHRUL 11. SUKRIHADI 12. ROBERT 13. DAIS 14. SYAIFUL 15. KASIM 16. RUSDI 17. LIKMAN 18. SALI ABAS 19. WILIEM 20. AHMAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 21. ALI 22. ABDUL RAHMAN 23. AZIS 24. UMAR 25. FARID 26. FRANS 27. ARNOLD 28. SAILAN 29. BAMBANG. S 30. MUHALI 31. MOH RIZAL 32. MARYADI 33. PATRI 34. ABDULMANAN 35. ZULKIFLI 36. ADE PUTRA 37. ADIN 38. TALFIK. M 39. BAIM 40. ABDULAH 41. ROSLAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Daftar Kelompok Preman Menduduki Tanah Sengketa



Mobil Operasional Unit Anti Premanisme Sat Reskrim Polrestro Jakarta Barat



Penangkapan Hercules



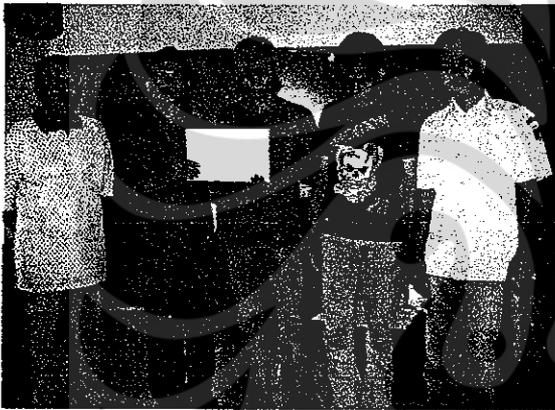
Persidangan dengan tersangka Hercules



Operasi Premanisme di wilayah Fatahillah Kota



**Para pelaku perusakan diskotik Stadium yang ditangkap oleh Unit Anti Premanisme
Polres Metro Jakarta Barat**



Sebagian Pelaku Premanisme yang Ditangkap oleh Unit Anti Preman Polrestro Jakbar

RIWAYAT HIDUP PENULIS



DATA

NAMA : SUYUDI ARIO SETO, SH, SIK
PANGKAT : KOMPOL
NRP : 73070291
JABATAN : KASAT RESKRIM POLRES METRO JAKARTA BARAT

TEMPAT LAHIR : JAKARTA
TGL. LAHIR : 14-07-1973
SUKU BANGSA : JAWA / INDONESIA
AGAMA : ISLAM

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN UMUM

1. SDN PENJARINGAN 012
2. SMP 70 TANAH ABANG
3. SMA 65 KEBON JERUK
5. AKADEMI KEPOLISIAN
6. UNIVERSITAS LANGLANG BUANA

LULUS TH 1985
LULUS TH 1988
LULUS TH 1991
LULUS TH 1994
LULUS TH 2004

PENDIDIKAN POLRI

1. AKADEMI KEPOLISIAN LULUS TH. 1994 SEMARANG
2. PTIK LULUS TH. 2001 - 2003

KEAHLIAN BAHASA

BAHASA ASING

1. BAHASA INGGRIS (AKTIF)

BAHASA DAERAH

1. JAWA (PASIF)

1. IPDA TMT 01-08-1994 TANGGAL, 30-07-1994
2. IPTU TMT 01-10-1997 TANGGAL, 12-09-1997
3. AKP TMT 01-01-2001 TANGGAL, 21-12-2000
4. KOMPOL TMT 01-07-2005 TANGGAL, 01-07-2005



RIWAYAT KEPANGKATAN

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1. PAMA PUS BRIMOB | TH. 1994 |
| 2. DANTON I KI 5119 | TH. 1995 – 1998 |
| 3. PASI INTELKAM SAT BRIMOB POLDA JABAR | TH. 1998 – 1999 |
| 4. DANKI 3 YON A SAT BRIMOB POLDA JABAR | TH. 1999 – 2001 |
| 5. DANKI 1 YON C SAT BRIMOB POLDA METRO JAYA | TH. 2003 – 2004 |
| 6. KANIT 2 RESMOB DIT RESKRIMUM POLDA METRO JAYA | TH. 2004 |
| 7. KAPOLSEK PASAR MINGGU POLRESTRO JAKSEL | TH. 2004 – 2005 |
| 8. KASAT RESKRIM POLRES JAKARTA SELATAN | TH. 2005 – 2006 |
| 9. KANIT 5 JATANRAS POLDA METRO JAYA | TH. 2006 – 2007 |
| 10. KASAT RESKRIM POLRES METRO TANGERANG | TH. 2007 |
| 11. KASAT RESKRIM POLRES METRO JAKARTA BARAT | TH. 2007 – 2010 |

RIWAYAT YANG DIMILIKI

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. SATYA LENCANA 8 TAHUN | TAHUN 2004 |
| 2. DHARMA NUSA | TAHUN 2004 |

Jakarta, Juli 2010

YANG MEMBUAT


SUYUDI ARIO SETO, SH, SIK
KOMISARIS POLISI NRP 73070291

